



KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
www.kemdikbud.go.id

Rencana Strategis

SEKRETARIAT JENDERAL

KEMENDIKBUDRISTEK

2020 - 2024

Revisi Tahun 2022

Daftar Isi



Daftar Isi

Pengantar II



Latar Belakang

Pendahuluan



Kerangka Kesuksesan

Tujuan Sekretariat Jenderal

Fokus Kesuksesan

Kerangka Kesuksesan 6

Struktur Organisasi 22



Kerangka Kelembagaan

Gambaran Umum unit Kerja
di bawah Sekretariat Jenderal



Kerangka Pendanaan

Penutup 39

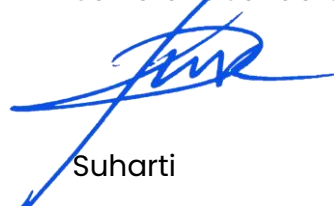
Kata Pengantar

Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Tahun 2020–2024 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020–2024. Rencana Strategis ini merupakan wahana Sekretariat Jenderal untuk mencapai salah satu tujuan Kemendikbudristek yaitu “Penguatan sistem tata kelola pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang partisipatif, transparan dan akuntabel”. Tujuan tersebut sejalan dengan misi Kemendikbudristek ketiga yaitu “Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi” serta selaras dengan salah satu misi Presiden untuk “Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya”.

Penyesuaian cara kerja Kemendikbudristek terus menerus dilakukan untuk mewujudkan tata kelola, pelayanan yang inovatif dan prima serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Pendekatan yang digunakan adalah mengubah budaya birokrasi konvensional menuju birokrasi yang modern dengan organisasi yang lebih lincah (*agile*) serta memanfaatkan teknologi informasi, dan komunikasi.

Rencana strategis Sekretariat Jenderal ini diharapkan menjadi rujukan seluruh unit kerja di bawah lingkungan Sekretariat Jenderal Kemendikbudristek dalam mengimplementasikan program dan kegiatan yang telah direncanakan secara terarah dan terukur melalui sinergi dan kolaborasi, sehingga tujuan dan tercapai.

Jakarta, April 2022
Sekretaris Jenderal



Suharti

Latar Belakang

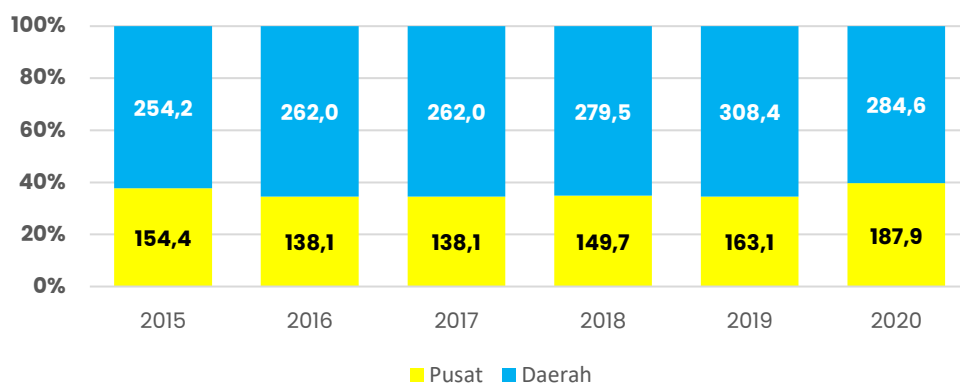
A. Pendahuluan

Dalam rangka mewujudkan cita-cita yang diharapkan dari pembangunan pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) berperan untuk memastikan pengelolaan yang berkesinambungan dari upaya-upaya pembangunan yang telah, sedang, dan akan dilakukan tersebut. Dokumen Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kemendikbudristek ini merupakan penyempurnaan dan penyesuaian setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020–2024.

Sejalan dengan regulasi tentang anggaran sektor pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, anggaran sektor pendidikan terus tumbuh melebihi 35% selama lima tahun terakhir. Besaran anggaran ini terefleksi dari jumlah penerima layanan Kemendikbudristek yang lebih dari 70 juta orang, baik sebagai peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan ataupun administrasi.

Tetapi, belanja sektor pendidikan ini didominasi belanja transfer daerah, sebesar 63%. Sementara anggaran Kemendikbudristek (dan termasuk Pendidikan tinggi) terus menurun, dari 23% di tahun 2016 – menjadi 15% di tahun 2020.

Gambar 1 Anggaran Pendidikan Pusat dan Daerah Tahun 2015–2020 (triliun rupiah)



Sumber: Perpres tentang Rincian APBN, 2015–2020



Kondisi ini tidak mengurangi peran strategis Sekretariat Jenderal. Dengan semakin dominannya belanja transfer daerah, fungsi koordinasi Sekretariat Jenderal menjadi semakin penting.

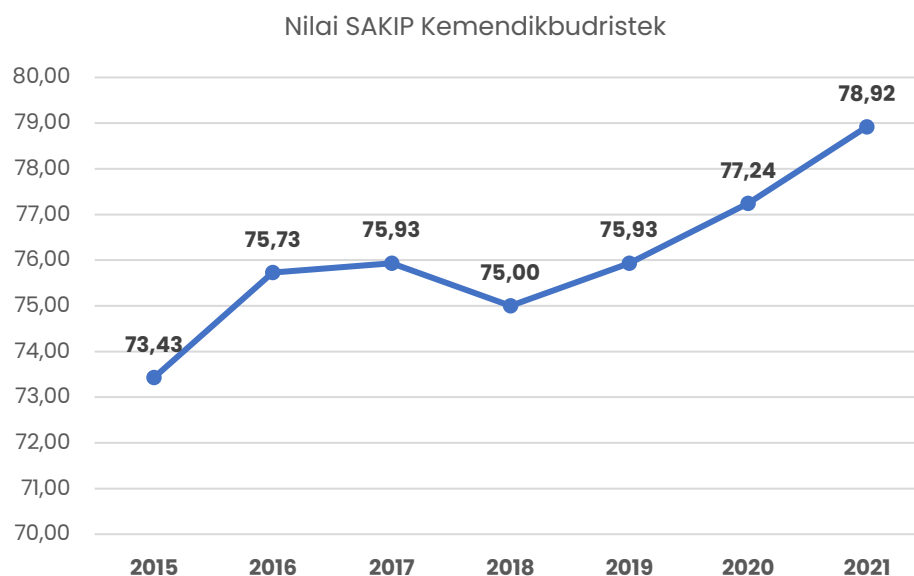
Sekretariat Jenderal harus mengembangkan metode kolaborasi yang efektif dengan pemerintah daerah, sekolah dan pemangku kepentingan pendidikan untuk memastikan belanja transfer daerah ini dioptimalkan untuk mencapai target pendidikan nasional. Terlebih saat ini, dimana Kebijakan Kemendikbudristek mendorong dana transfer pendidikan disalurkan langsung ke sekolah.

Salah satu peran penting Sekretariat Jenderal adalah pengembangan *platform* digital pendidikan dan penyediaan data informasi pendidikan yang berperan penting dalam pengawalan belanja daerah dan sekolah, dengan mengelola data pokok pendidikan dan mendorong belanja transfer - terutama ke sekolah, yang dilakukan secara *non-tunai*.

Selain sisi kolaborasi dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, fungsi utama Sekretariat Jenderal adalah dalam penguatan tata kelola. Salah satu poin penting dalam hal ini adalah pelaksanaan Reformasi Birokrasi Internal. Beberapa inisiatif terkait penguatan Reformasi Birokrasi Internal ini adalah peran kunci Sekretariat Jenderal, seperti: deregulasi hukum, pengelolaan Sumber Daya Manusia profesional berbasis merit, sistem pemerintahan berbasis elektronik, pengelolaan Barang Milik Negara, pelaporan keuangan dan akuntabilitas kinerja.

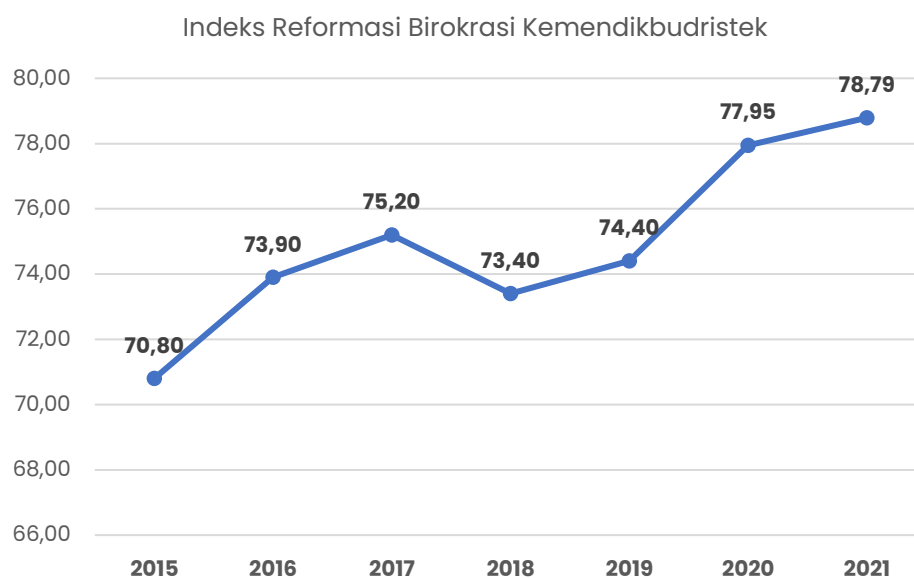
Perkembangan Reformasi Birokrasi Kemendikbudristek telah menunjukkan capaian yang menggembirakan. Melihat tren positif skor indeks Reformasi Birokrasi Internal dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kemendikbudristek seperti di Gambar 2 dan Gambar 3 Penurunan di tahun 2018 harus menjadi perhatian dan ditindaklanjuti dengan langkah konkret yang harus tercantum dalam rencana strategis Sekretariat Jenderal.

Gambar 2 Capaian Nilai SAKIP Kemendikbudristek



Sumber: Hasil Penilaian Kementerian PAN-RB, 2015–2021

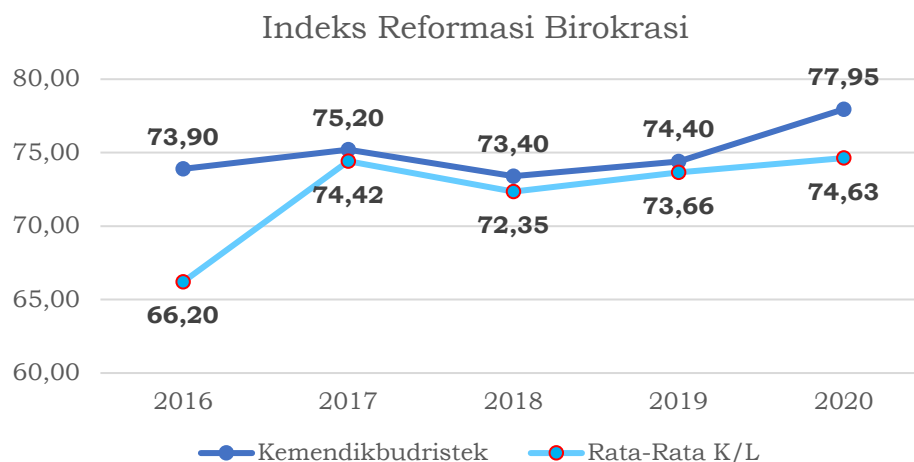
Gambar 3 Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbudristek Tahun 2015–2021



Sumber: Hasil Penilaian Kementerian PAN-RB, 2015–2021



**Gambar 4 Perbandingan dengan Rata-Rata Indeks Reformasi Birokrasi
Kementerian/Lembaga Tahun 2017–2020**



Sumber: Laporan Kinerja Kementerian PAN-RB, 2020

Mengingat besarnya anggaran sektor pendidikan ataupun anggaran belanja pusat Kemendikbudristek dan besarnya jumlah pemangku kepentingan yang terdampak. Maka penting bagi Kemendikbudristek untuk memperkuat tata kelola, kerja sama dan pemanfaatan teknologi informasi. Untuk itu perlu disusun rencana strategis Sekretariat Jenderal yang dapat menangkap kebutuhan ini dan meyakinkan terwujudnya dukungan Sekretariat Jenderal bagi segenap pemangku kepentingan pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi di Indonesia.

Kerangka Kesuksesan

A. Tujuan Sekretariat Jenderal

Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memberikan mandat kepada Sekretariat Jenderal untuk menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di Kemendikbudristek.

Peningkatan pelayanan publik dan keterbukaan informasi kepada seluruh pemangku kepentingan terus diupayakan oleh Sekretariat Jenderal. Beragam inovasi yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat terus diupayakan guna membuka ruang keterlibatan masyarakat.

Partisipasi masyarakat penting untuk mewujudkan pemerintahan yang berkualitas, bersih, efektif, efisien, dan terpercaya sebagaimana tertera dalam salah satu misi Presiden atau Nawa cita kedua. Sekretariat Jenderal juga memiliki peran penting untuk mendukung pelaksanaan transformasi yang berkelanjutan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

Untuk mengoptimalkan peran dan fungsi Sekretariat dalam mewujudkan layanan pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang berkualitas, Sekretariat Jenderal menetapkan tujuan sebagai berikut:

Tabel 1 Tujuan, Indikator Kinerja, dan Target Keberhasilan Sekretariat Jenderal

Tujuan	Indikator Kinerja	Target Keberhasilan
Mengoptimalkan penguatan sistem tata kelola pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang partisipatif, transparan dan akuntabel	Opini Laporan Keuangan Kemendikbudristek	WTP
	Indeks kepuasan pemangku kepentingan Kemendikbudristek	84
	Predikat SAKIP Kemendikbudristek	A
	Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbudristek	87



B. Fokus Kesuksesan Sekretariat Jenderal

Dengan mempertimbangkan tujuan Sekretariat Jenderal untuk membentuk sebuah sistem tata kelola Kementerian yang partisipatif, transparan dan akuntabel untuk mendukung transformasi yang berkelanjutan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi melalui keterlibatan para pemangku kepentingan, diperlukan beragam strategi.

1. Penguatan manajemen dan tata kelola yang berkelanjutan untuk meningkatkan *good governance*
 - a. Penerapan mekanisme *open government* pada seluruh unit kerja.
 - b. Perencanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran serta penguatan dan pembinaan akuntabilitas kinerja dengan sistem yang terintegrasi.
 - c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan dan dokumentasi kementerian.
 - d. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana.
 - e. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pengelolaan pengadaan barang/jasa.
2. Koordinasi dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk menghadirkan pendidikan yang merata dan berkualitas
 - a. Pemberdayaan dan pelibatan seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas distribusi anggaran.
 - b. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum.
 - c. Koordinasi dan kolaborasi untuk peningkatan kerja sama Pendidikan.
3. Inovasi layanan berbasis Pemanfaatan Teknologi Informasi
 - a. Mengembangkan sistem informasi yang akurat, terpercaya dan terbaru bagi para pemangku kepentingan untuk peningkatan kualitas layanan
 - b. Menghadirkan infrastruktur sekolah/kelas dan kampus masa depan yang menunjang proses belajar mengajar.
4. Penumbuhan karakter untuk mewujudkan Pelajar Pancasila
 - a. Menciptakan Pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan YME dan berakhlak mulia, berkebhinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif.
 - b. Peningkatan prestasi pelajar Indonesia.



5. Perluasan akses pendidikan berkualitas bagi seluruh peserta didik melalui mekanisme pembiayaan pendidikan
 - a. Pembiayaan pendidikan untuk memastikan bahwa seluruh warga negara Indonesia dapat mengenyam pendidikan yang layak.

C. Kerangka Kesuksesan Sekretariat Jenderal

Kerangka kesuksesan Sekretariat Jenderal ini disusun dengan pendekatan yang mengkombinasikan *Top-Down* dengan melihat arah kebijakan kementerian dan Sekretariat Jenderal, dan *Bottom-Up* yang melihat aspirasi dari masing-masing unit kerja. Di bagian ini kedua pendekatan dapat diramu menjadi lima kerangka kesuksesan Sekretariat Jenderal.

Kerangka kesuksesan ini tidak dimaksud sebagai daftar komprehensif dari seluruh program, kegiatan dan indikator pendukung dibawah Sekretariat Jenderal. Juga tidak dimaksudkan sebagai daftar yang disusun per unit kerja. Kerangka kesuksesan Sekretariat Jenderal lebih dimaksudkan sebagai fokus utama Sekretariat Jenderal di lima tahun ke depan, dan bagaimana unit kerja bisa bersinergi dan bekerja sama dalam mendukung tercapainya tujuan Sekretariat Jenderal, Kemendikbudristek serta Rencana Pembangunan Pemerintah di periode 2020–2024.

1. Penguatan tata kelola kementerian melalui upaya mendorong tercapainya Reformasi Birokrasi Internal

Reformasi birokrasi dimaknai sebagai salah satu upaya pembaharuan penyelenggaraan pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*), dan untuk mencapai hal tersebut Sekretariat Jenderal selaku unit organisasi Kemendikbudristek yang memiliki fungsi koordinasi pembinaan dan dukungan administrasi di lingkungan Kemendikbudristek perlu memastikan bahwa:

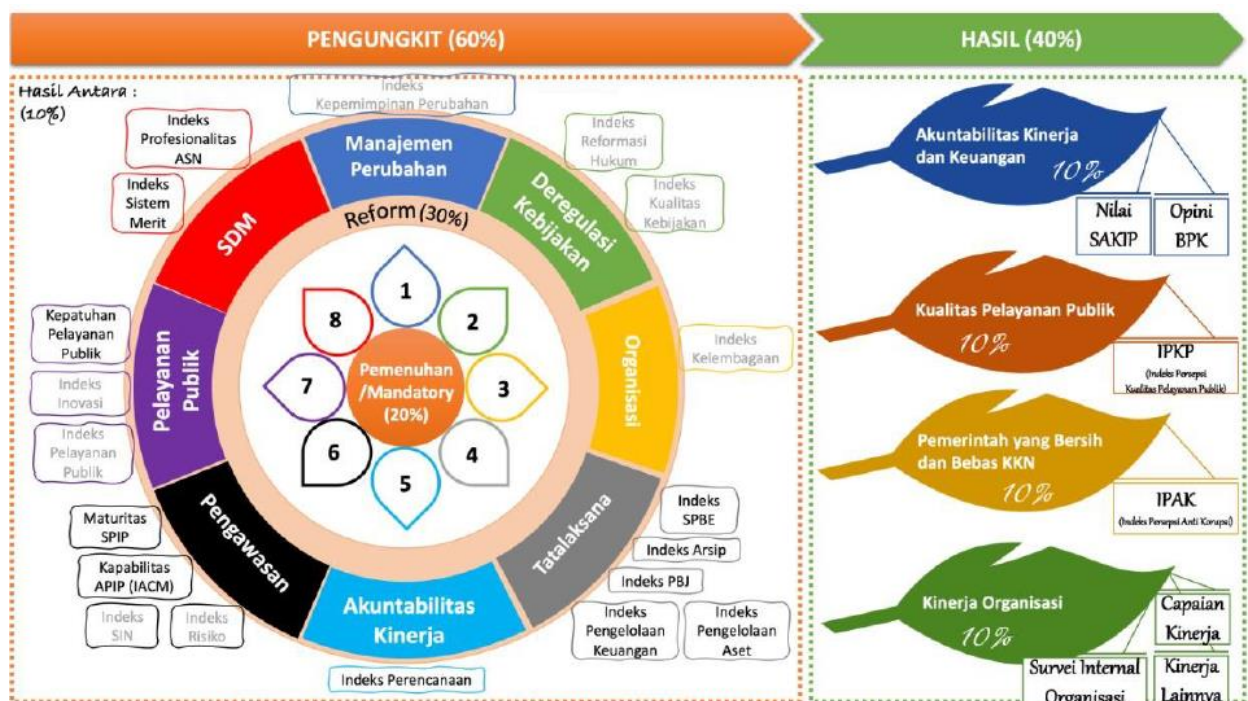
- a. Sumber Daya Manusia Kemendikbudristek memiliki integritas yang tinggi, profesional dan kompeten berdasarkan sistem merit sesuai bidang tugasnya;
- b. Kualitas tata laksana yang efektif, efisien dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik; dan
- c. Kapasitas dan akuntabilitas kinerja Kemendikbudristek yang bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, transparan dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.



Reformasi Birokrasi merupakan upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya memberikan perubahan atau perbaikan birokrasi ke arah yang lebih baik. Visi reformasi birokrasi adalah “Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia”. Visi tersebut menjadi acuan dalam mewujudkan pemerintahan kelas dunia yaitu pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi yang mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis agar mampu menghadapi tantangan pada abad ke-21 melalui tata pemerintahan yang baik pada tahun 2025.

Kemendikbudristek menerapkan pelaksanaan reformasi birokrasi yang mencakup delapan area, yakni manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Gambar 5 Kerangka Logis Reformasi Birokrasi Internal



Sumber: Permen PAN-RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Di Instansi Pemerintah Tahun 2020-2024

Dalam periode tahun 2014-2019, Kemendikbudristek telah meningkatkan upaya perbaikan indeks reformasi birokrasi di 8 (delapan) area perubahan.

Indeks reformasi birokrasi diawali dengan 70,79 pada tahun 2015 yang terus mengalami peningkatan di tahun 2016 (73,91) dan tahun 2017 (75,2). Indeks reformasi birokrasi turun di tahun 2018 menjadi 73,35 karena terjadi perubahan instrumen penilaian mandiri pelaksanaan zona integritas yang belum tersosialisasi dengan baik. Pada tahun 2019, indeks reformasi birokrasi mulai meningkat kembali menjadi 74,39 tahun 2020 indeks reformasi birokrasi meningkat menjadi 77,95, dan tahun 2021 meningkat Kembali menjadi 78,79.

Di samping nilai-nilai capaian indeks tersebut di atas, pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kemendikbudristek juga menunjukkan beberapa wujud keberhasilannya, meliputi.

- a. Upaya penguatan pelayanan publik juga terlihat dengan dibentuknya Unit Layanan Terpadu pada Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kemendikbudristek yang berada di 34 provinsi, sehingga masyarakat penerima layanan di daerah tidak perlu ke Jakarta untuk menerima layanan dari Kemendikbudristek karena telah terlayani di daerahnya masing-masing.
- b. Dukungan dari pimpinan kementerian pada berbagai tingkatan organisasi yang mampu memicu berbagai inovasi di bidang manajemen dan tata kelola organisasi, sehingga layanan yang diberikan dengan dukungan teknologi informasi dapat memberikan kemudahan dan kecepatan layanan kepada penerima layanan.

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) adalah model penilaian mandiri yang berbasis prinsip *Total Quality Management* dan digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap kinerja instansi pemerintah.

Selanjutnya dalam indikator kinerja program juga telah ditetapkan nilai PMPRB Kemendikbudristek sebagai berikut:

Tabel 2 Indikator Kinerja PMPRB Kemendikbudristek

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator	Satuan	Baseline	Target		
			2020	2022	2023	2024
Program Dukungan Manajemen						
SP	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudristek					
IKP 5.4.1	Nilai PMPRB Kemendikbudristek	Nilai	87	89	90	91

Sumber: Lampiran 1C Permendikbudristek Nomor 13 Tahun 2022



Penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi harus menyimpulkan hasil penilaian atas fakta objektif unit kerja dalam melaksanakan program RB sesuai dengan indikator masing-masing komponen yang ada dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE). PMPRB tahun 2021 sebanyak 8 unit eselon satu berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam Renstra (88), sementara Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa hanya mencapai 85. Oleh sebab itu, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menjadi fokus dalam pendampingan pelaksanaan reformasi birokrasi internal tahun 2022.

Tabel 3 Indikator Kinerja Fokus Kesuksesan 1 Tahun 2020–2021

Indikator	Tahun	
	2020	2021
Persentase pegawai dengan tingkat kedisiplinan tinggi	84	90
Persentase unit kerja di lingkungan Kemendikbud yang hasil evaluasi organisasinya efektif	60	70
Persentase jumlah satker yang mengimplementasikan sistem naskah dinas elektronik	10	20
Persentase satker yang predikat SAKIP-nya minimal A	45	60
Jumlah laporan keuangan yang disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	13	13
Persentase masalah hukum, kasus, dan perkara yang ditangani di lingkungan Kemendikbud	100	100

Tabel 4 Indikator Kinerja Fokus Kesuksesan 1 Tahun 2022–2024

Indikator	Tahun	
	2022	2024
Jumlah Laporan Keuangan yang disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan perundang-undangan	22	22
Jumlah unit kerja yang mengimplementasikan sistem naskah dinas elektronik	206	343
Persentase Satker yang predikat SAKIP-nya minimal A	55	80
Persentase pegawai yang memperoleh nilai kinerja minimal 110	35	45
Persentase unit kerja di lingkungan Kemendikbudristek yang hasil evaluasi organisasinya efektif	95	100
Persentase masalah hukum dan perkara yang ditangani di lingkungan Kemendikbudristek	100	100
Persentase kualitas pelayanan publik bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi	82	86



Indikator	Tahun	
	2022	2024
Persentase peraturan perundang-undangan bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang telah diharmonisasi	100	100

Strategi Fokus Kesuksesan 1

Dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai Kemendikbudristek untuk mendorong ketercapaian Reformasi Birokrasi, Biro Sumber Daya Manusia bersama Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai mengembangkan kompetensi Sumber Daya Manusia melalui *Learning Organization* yang didukung oleh *assessment center*, Wiyata Kinarya Merdeka Belajar dan *talent pool* Sumber Daya Manusia yang dapat mendorong terwujudnya Sumber Daya Manusia Kemendikbudristek yang berintegritas tinggi, professional dan kompeten berdasarkan sistem merit sesuai bidang tugasnya.

Selain penguatan Sumber Daya Manusia, penguatan tata Kelola Kementerian juga perlu didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi untuk peningkatan kualitas tata laksana diantaranya:

- a. Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa mengembangkan sistem persuratan dan kearsipan berbasis teknologi guna memberikan layanan pengelolaan persuratan dan kearsipan yang efektif dan efisien. Hal ini juga didukung oleh Pusat teknologi informasi dan komunikasi Pendidikan yang mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).
- b. Selain itu, sebuah sistem informasi pendukung dengan pendekatan *Single Sign On* (SSO):
 - 1) Untuk mendukung perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan juga dikembangkan oleh Biro Perencanaan untuk meningkatkan kualitas layanan penganggaran, evaluasi dan pelaporan akuntabilitas kinerja Kementerian.
 - 2) Untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dalam pengembangan kompetensi ASN yang dikembangkan oleh Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai bersama dengan Pusat Data Dan Teknologi Informasi.
- c. Biro Keuangan dan Barang Milik Negara juga turut mengembangkan berbagai aplikasi di bidang pengelolaan keuangan dan barang milik negara. Untuk pengelolaan keuangan terdapat Aplikasi Monitoring Laporan Keuangan (MoLK) yang mampu menghadirkan realisasi anggaran, realisasi pencapaian fisik, dan laporan keuangan seluruh satker di lingkungan Kemendikbudristek secara *online* dan *real time*



yang telah terintegrasi langsung dengan aplikasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dan E-Rekonsiliasi Laporan Keuangan (E-Rekon LK) dari Kementerian Keuangan.

Selain itu, untuk pengelolaan barang milik negara, terdapat aplikasi SIMAS DIKBUD yang merupakan sebuah sistem informasi yang dapat menyajikan data terkait aset strategis yang dimiliki oleh Kemendikbudristek untuk mengoptimalkan tata kelola barang milik negara yang telah terintegrasi dengan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) dari Kementerian Keuangan. Adapun sistem informasi ini ditujukan untuk memberikan kemudahan dan kecepatan dalam mendapatkan informasi aset strategis (Barang Milik Negara) bagi seluruh *stakeholder* di lingkungan Kemendikbudristek.

Disamping penguatan Sumber Daya Manusia, unit kerja di Kemendikbudristek juga harus efektif. Suatu unit kerja dikatakan efektif apabila hasil evaluasi organisasinya minimal berada pada peringkat komposit P4 sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah.

Pengintegrasian fungsi ilmu pengetahuan dan teknologi ke dalam Kemendikbudristek sebagaimana dimandatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi berdampak pada perubahan struktur organisasi. Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi, Kemendikbudristek telah melakukan penataan organisasi di lingkungan Kemendikbudristek sebagaimana telah ditetapkan dengan Permendikbudristek Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Penataan organisasi Kemendikbudristek meliputi penataan pada semua unit utama, Unit Pelaksana Teknis, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, Sekretariat Lembaga Sensor Film, dan Perguruan Tinggi Negeri.

Tahapan penataan organisasi meliputi:

1. Penyederhanaan organisasi/*delayering* yang mengacu pada kebijakan Presiden terkait penyederhanaan birokrasi pada organisasi pemerintah, dimana organisasi sampai pada level dua dan untuk organisasi level 3 dan 4 dilaksanakan oleh jabatan fungsional. Penyederhanaan organisasi dilakukan pada semua unit kerja di lingkungan Kemendikbudristek.

2. Pemurnian organisasi, yaitu perubahan struktur organisasi agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemurnian organisasi di lingkungan Kemendikbudristek telah dilakukan pada organisasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, sehingga struktur organisasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi saat ini telah mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/18/M.PAN/11/2008. Di samping itu, dilakukan pula pemurnian organisasi untuk organisasi SEAMEO sehingga kedudukan, struktur organisasi, serta tugas dan fungsi SEAMEO sesuai dengan mandat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Redesain organisasi, yaitu mendesain ulang struktur organisasi yang ada di lingkungan Kemendikbudristek sehingga lebih efektif dan efisien dalam mendukung transformasi kebijakan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
Redesain organisasi di lingkungan Kemendikbudristek telah dilakukan pada beberapa Unit Pelaksana Teknis, yaitu:
 - a. Unit Pelaksana Teknis, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, dan Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat menjadi Unit Pelaksana Teknis Balai Besar Peningkatan Mutu Pendidikan / Balai Peningkatan Mutu Pendidikan;
 - b. 7 Unit Pelaksana Teknis Museum, Galeri Nasional, Balai Konservasi Borobudur, dan Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran menjadi Unit Pelaksana Teknis Museum dan Cagar Budaya;
 - c. Unit Pelaksana Teknis Balai Pelestarian Cagar Budaya dan Balai Pelestarian Nilai Budaya menjadi Unit Pelaksana Teknis Balai Pelestarian Kebudayaan; dan
 - d. Unit Pelaksana Teknis Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah menjadi Unit Pelaksana Teknis Balai Besar Guru Penggerak/Balai Guru Penggerak.
4. Pembentukan/pengembangan organisasi, yaitu dengan membentuk organisasi baru yang diperlukan untuk mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kementerian.
Pembentukan organisasi Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kemendikbudristek meliputi Balai Pengembangan Talenta Indonesia, Balai Media Kebudayaan, Balai Layanan Platform Teknologi. Adapun saat ini, terdapat dua Unit Pelaksana Teknis yang sedang dalam proses



pembentukan yaitu Balai Pengelola Pengujian Pendidikan dan Balai Pengelola Layanan Pembiayaan Pendidikan Tinggi.

5. Pemekaran organisasi, dilakukan dalam rangka keseimbangan beban kerja sehingga organisasi dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara lebih efektif.

Pemekaran organisasi yang saat ini diusulkan adalah pemekaran Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah X yang meliputi wilayah kerja Sumatera Barat, Riau, Jambi dan Kepulauan Riau menjadi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah X dengan wilayah kerja Sumatera Barat dan Jambi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XVII dengan wilayah kerja Riau dan Kepulauan Riau.

6. Penghapusan organisasi, dilakukan pada unit kerja yang dipandang tidak lagi sesuai dengan kondisi, tugas dan fungsi, serta sasaran strategis Kementerian saat ini. Penghapusan organisasi di lingkungan Kemendikbudristek dilakukan pada Balai Pengembangan Media Televisi Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan, dan Balai Pengembangan Multimedia Pendidikan dan Kebudayaan.

2. Peningkatan Kolaborasi bersama seluruh pemangku kepentingan untuk pendidikan yang merata dan berkualitas

Sinergi dan kolaborasi bersama seluruh pemangku kepentingan terutama pemerintah pusat dan daerah menjadi satu hal yang penting guna memastikan bahwa layanan pendidikan berkualitas dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat, oleh karena itu Sekretariat Jenderal perlu memastikan:

- a. Efektivitas dan efisiensi kebijakan, program dan anggaran Kemendikbudristek serta anggaran transfer daerah bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi;
- b. Penyebarluasan informasi program kebijakan Kemendikbudristek kepada masyarakat luas;
- c. Peningkatan kerja sama dalam dan luar negeri melalui diplomasi bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi;
- d. Penggunaan data sebagai bahan pengambilan kebijakan; dan
- e. Penguatan dukungan kepada Layanan Lembaga pendidikan tinggi swasta.

Tabel 5 Indikator Kinerja Fokus Kesuksesan 2 Tahun 2020–2021

Indikator	Tahun	
	2020	2021
Persentase pemanfaatan anggaran DAK bidang pendidikan dan kebudayaan yang sesuai dengan capaian output	72	74
Persentase peningkatan akses dan kualitas informasi dan publikasi program/kebijakan prioritas bidang pendidikan dan kebudayaan yang disampaikan melalui media	80	82
Persentase integritas data prioritas (standar, metadata, referensi)	40,33	55,25
Jumlah satuan pendidikan yang dijadikan model dalam pengembangan pendidikan terbuka dan jarak jauh (PTJJ) di Asia Tenggara	30	32

Tabel 6 Indikator Kinerja Fokus Kesuksesan 2 Tahun 2022–2024

Indikator	Tahun	
	2022	2024
Jumlah satuan pendidikan yang dijadikan model dalam pengembangan Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh (PTJJ), gizi dan pangan di Kawasan Asia Tenggara	184	188
Persentase kualitas publikasi dan informasi bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi	84	88
Persentase tindak lanjut kerjasama bilateral, regional dan multilateral	77	81
Persentase integritas data prioritas (standar, metadata, referensi)	70,16	100
Persentase kesesuaian kebijakan anggaran dana alokasi khusus pendidikan terhadap pelaksanaan anggaran	88	90

Strategi Fokus Kesuksesan 2

Salah satu fokus Sekretariat Jenderal melalui Biro Perencanaan yaitu membangun kolaborasi bersama pemerintah daerah dan mitra pembangunan dalam menyusun kebijakan strategis bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi agar semakin tepat sasaran dan berdampak. Hal ini menjadi tantangan yang cukup besar sehingga diperlukan partisipasi dan kolaborasi baik internal Kemendikbudristek, antar Kementerian/Lembaga terkait hingga pemerintah daerah. Sebuah sistem terpadu dikembangkan untuk memastikan ketersediaan Dana Alokasi Khusus dan pemanfaatannya dapat berjalan secara maksimal.



Selain itu, kolaborasi dengan mitra pendidikan diperlukan dalam pengelolaan dan pendayagunaan data pendidikan, bahasa dan kebudayaan. Pusdatin melakukan banyak kolaborasi dengan pihak luar seperti (TVRI, TV Lokal, RRI dan operator telekomunikasi) untuk mengakselerasi program-program pembelajaran berbasis digital.

3. Inovasi layanan pendidikan dan kebudayaan berbasis pada pemanfaatan teknologi informasi

Dunia pendidikan sangat erat dengan teknologi, oleh karena itu Sekretariat Jenderal berupaya untuk menghadirkan inovasi layanan yang berbasis pemanfaatan teknologi informasi salah satunya adalah melalui pengembangan *platform* digital pendidikan nasional. Berikut beberapa hal lainnya terkait pemanfaatan teknologi informasi:

- a. Peningkatan pemanfaatan *platform* digital untuk mendukung layanan pendidikan; dan
- b. Pemanfaatan teknologi informasi untuk tata kelola pemerintahan, diantaranya sistem pengadaan barang dan jasa yang terpadu, mekanisme persuratan dan kearsipan yang berbasis teknologi, hingga peningkatan mutu layanan pelatihan yang berbasis teknologi informasi.

Tabel 7 Indikator Kinerja Fokus Kesuksesan 3 Tahun 2020–2021

Indikator	Tahun	
	2020	2021
Jumlah kumulatif guru penggerak/ komunitas yang terampil menerapkan pembelajaran digital	28.000	40.000
Jumlah siswa (siswa dan mahasiswa) yang memperoleh peluang kerja Jumlah siswa (siswa dan mahasiswa) yang memperoleh peluang kerja	100.000	299.290
Jumlah satker yang melaksanakan PBJ melalui <i>e-procurement</i>	167	207

Tabel 8 Indikator Kinerja Fokus Kesuksesan 3 Tahun 2022–2024

Indikator	Tahun	
	2022	2024
Jumlah kumulatif SDM yang mendapatkan layanan pembinaan jabatan fungsional pengembangan teknologi pembelajaran	3.510	3.900
Jumlah Pendidik dan Peserta Didik yang memanfaatkan Platform digital	3.382.604	6.765.208
Persentase optimalisasi fungsi UKPBJ Kemendikbudristek	75	100

Strategi Fokus Kesuksesan 3

Pusat Data dan Teknologi Informasi mengembangkan bahan belajar atau konten pembelajaran berbasis digital untuk mendukung beragam program Kementerian diantaranya program merdeka belajar, belajar dari rumah, dan pembelajaran daring lainnya melalui portal rumah belajar. Selain itu, Pusat Data dan Teknologi Informasi juga fokus untuk mengembangkan platform Pendidikan sebagai produk yang dapat menyediakan nilai tambah untuk pengguna. Pemanfaatan teknologi menjadi sangat penting sebagai antisipasi kebutuhan dan kondisi yang terus berubah.

Pemanfaatan teknologi tidak hanya digunakan dalam hal peningkatan akses layanan pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi saja, namun dari sisi penyelenggaraan pemerintahan, peran teknologi informasi juga sangat tinggi. Sekretariat Jenderal sebagai koordinator fungsi administrasi Kementerian tentunya memerlukan teknologi informasi untuk memberikan layanan yang lebih maksimal, salah satu sistem yang dikembangkan adalah Sistem Perencanaan Barang dan Jasa untuk pengadaan barang dan jasa.

Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kementerian sesuai dengan Pasal 326 Permendikbudristek 28 Tahun 2021 melaksanakan peningkatan kapabilitas UKPBJ melalui model kematangan UKPBJ, dengan melakukan penilaian mandiri dan menyusun dan melaksanakan peta jalan peningkatan kematangan UKPBJ. Pencapaian Tingkat Kematangan Level 3 (*Proaktif*) untuk seluruh variabel penilaian telah dipenuhi UKPBJ Kemendikbudristek pada Bulan Juli 2020 (B19), sebelum batas akhir target Rencana Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).

Penilaian Tingkat Kematangan sangat bergantung dari pemenuhan target Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sebagai

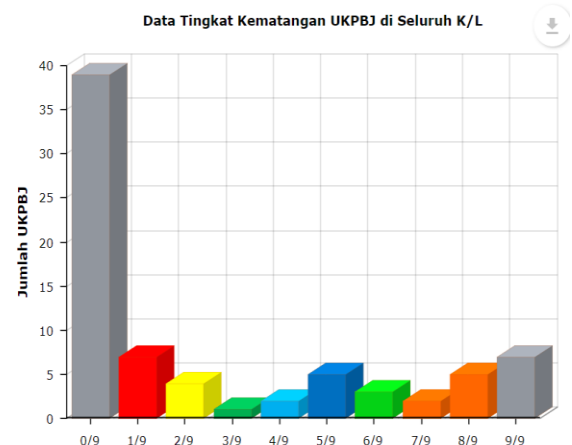


Instansi Pembina Pengadaan Barang/Jasa. Dimana dari target 100% UKPBJ mencapai Tingkat Kematangan Level 3 (*Proaktif*), baru 9,33% atau 7 K/L dari 75 UKPBJ di seluruh K/L sehingga LKPP mendorong UKPBJ Kemendikbudristek dapat menjadi contoh dan *role model* bagi UKPBJ K/L/Pemerintah Daerah lainnya.

Gambar 6 Data tingkat kematangan UKPBJ di seluruh K/L

Data Tingkat Kematangan UKPBJ di Seluruh K/L

Tingkat Kematangan	Jumlah UKPBJ	%
Tingkat Kematangan 0/9	39	52.00
Tingkat Kematangan 1/9	7	9.33
Tingkat Kematangan 2/9	4	5.33
Tingkat Kematangan 3/9	1	1.33
Tingkat Kematangan 4/9	2	2.67
Tingkat Kematangan 5/9	5	6.67
Tingkat Kematangan 6/9	3	4.00
Tingkat Kematangan 7/9	2	2.67
Tingkat Kematangan 8/9	5	6.67
Tingkat Kematangan 9/9	7	9.33
TOTAL	75	100



Sumber: siukpbj.lkpp.go.id

Selain menilai Tingkat Kematangan UKPBJ, LKPP sebagai satu-satunya lembaga yang bertugas melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menjadi salah satu *leading sector* dalam tingkat *meso* pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2020–2024, khususnya Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik.

Upaya UKPBJ Kemendikbudristek meningkatkan kualitas pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa, diukur dengan Indikator Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik dan *Logframe* Aksi Pencegahan Korupsi, antara lain:

- a. Pemanfaatan Sistem Pengadaan, terdiri dari:
 - 1) SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan);
 - 2) E-Tendering/E-Seleksi;
 - 3) E-Purchasing;
 - 4) Non-E-Tendering & Non-E-Purchasing; dan
 - 5) E-Kontrak.
- b. Kualifikasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (PBJ)

Dalam menjalankan tata kelola organisasi Kepala UKPBJ menetapkan manajemen penugasan yang menjadi acuan dalam mengatur Sumber Daya Manusia PBJ sebagai pelaksana teknis di bidang PBJ.

Manajemen Penugasan Sumber Daya Manusia PBJ dengan mempertimbangkan kebutuhan dan pemerataan beban kerja serta memperhatikan pemberian kesempatan untuk peningkatan kapasitas dan pengalaman Sumber Daya Manusia PBJ.

c. Tingkat Kematangan UKPBJ

Dalam hal penyelenggaraan tugas dan fungsi UKPBJ, dibentuk satuan pelaksana yang berkedudukan di bawah UKPBJ. Pembentukan Satuan Pelaksana dilakukan berdasarkan pertimbangan yang meliputi dan tidak terbatas pada aspek beban kerja, ketersediaan Sumber Daya Manusia PBJ, anggaran, dan kondisi geografis.

4. Penumbuhan karakter untuk mewujudkan pelajar Pancasila

Sejalan dengan komitmen Kemendikbudristek untuk menciptakan Pelajar Pancasila dengan 6 (enam) ciri utama: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebhinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif, maka dibutuhkan sebuah mekanisme atau gerakan penumbuhan karakter sehingga profil pelajar Pancasila dapat terwujud.

Tabel 9 Indikator Kinerja Fokus Kesuksesan 4 Tahun 2020–2021

Indikator	Tahun	
	2020	2021
Jumlah konten penguatan karakter satuan pendidikan yang dihasilkan dan disebarluaskan	30	30
Jumlah peserta didik yang mengikuti kompetisi internasional	289	310
Jumlah masyarakat yang melaksanakan budaya sensor mandiri	1250	2000

Tabel 10 Indikator Kinerja Fokus Kesuksesan 4 Tahun 2022–2024

Indikator	Tahun	
	2022	2024
Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan materi penguatan karakter terkait Profil Pelajar Pancasila pada ekosistem pendidikan	219	548
Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan materi penguatan karakter untuk	191	548



Indikator	Tahun	
	2022	2024
menuntaskan perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi pada ekosistem pendidikan		
Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan materi penguatan karakter terkait toleransi beragama, kesetaraan gender, komitmen kebangsaan, layanan siswa kebutuhan khusus, pembelajaran yang demokratis pada ekosistem pendidikan	164	548
Jumlah peserta didik berprestasi yang terdokumentasi pada sistem manajemen talenta	15.000	25.000

Strategi Fokus Kesuksesan 4

Penyebarluasan konten kepada satuan pendidikan, keluarga dan masyarakat. Konten-konten tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat atas konsep merdeka belajar sekaligus juga meningkatkan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Sejalan dengan Pusat Prestasi Nasional yang mendukung fasilitasi peserta didik dan satuan Pendidikan untuk mengikuti beragam kompetisi baik nasional maupun internasional sehingga diharapkan dapat meningkatkan daya juang dan karakter peserta didik untuk dapat dikembangkan dan dimasukkan dalam manajemen talenta.

5. Perluasan akses pendidikan berkualitas bagi seluruh peserta didik melalui mekanisme pembiayaan Pendidikan

Penyediaan akses pendidikan khususnya bagi peserta didik miskin/rentan miskin dan/atau berprestasi untuk mendapatkan pendidikan yang merata dan berkualitas melalui Program Indonesia Pintar dan Beasiswa Unggulan. Selain itu, Penyediaan akses pendidikan juga diperuntukkan untuk peserta didik yang ada di luar negeri melalui Sekolah Indonesia Luar Negeri.

Tabel 11 Indikator Kinerja Fokus Kesuksesan 5 Tahun 2020–2021

Indikator	Tahun	
	2020	2021
Jumlah siswa yang memperoleh KIP–Dikdasmen	17.927.992	17.927.992
Jumlah mahasiswa yang memperoleh KIP–Kuliah	773.064	1.102.587
Jumlah guru dan tenaga kependidikan Non–PNS yang memperoleh tunjangan/insentif	311.577	321.024

Tabel 12 Indikator Kinerja Fokus Kesuksesan 5 Tahun 2022–2024

Indikator	Tahun	
	2022	2024
Jumlah siswa SD/SDLB/Sederajat yang memperoleh PIP	10.360.614	10.360.614
Jumlah siswa SMP/SMPLB/Sederajat yang memperoleh PIP	4.369.968	4.369.968
Jumlah siswa SMA/SMK/SMLB/ Sederajat yang memperoleh PIP	3.197.410	3.197.410
Jumlah mahasiswa yang memperoleh beasiswa KIP-Kuliah/Afirmasi/Prestasi	775.620	927.627
Jumlah guru dan tenaga kependidikan Non PNS yang memperoleh tunjangan/bantuan	355.500	341.599
Jumlah sekolah Indonesia Luar Negeri yang mendapatkan layanan pembiayaan	13	13

Strategi Fokus Kesuksesan 5

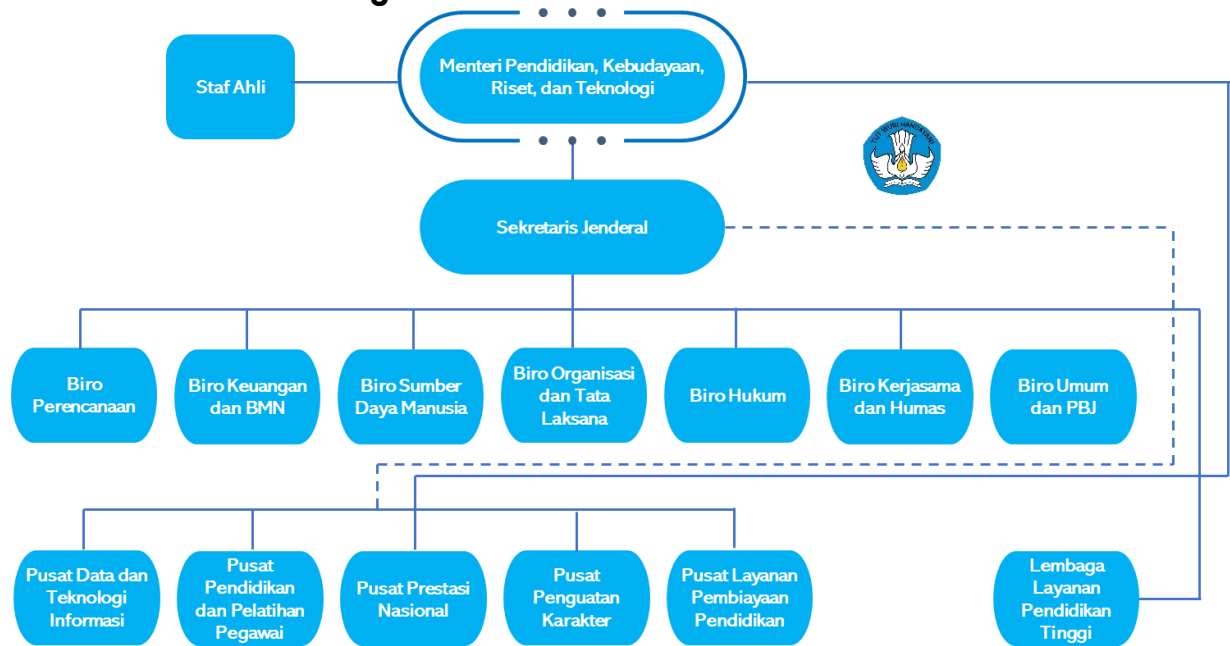
Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan berkomitmen untuk menciptakan kepastian belajar mengajar bagi peserta didik dan pendidik melalui layanan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran dan terpadu, oleh karenanya Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan membangun integrasi Sistem Informasi Manajemen aneka bantuan dan tunjangan layanan pembiayaan pendidikan.

D. Struktur Organisasi

Guna mendukung ketercapaian strategi kesuksesan Sekretariat Jenderal dibutuhkan struktur organisasi yang efektif dan efisien. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Sekretariat Jenderal Kemendikbudristek merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Unit organisasi Eselon I Kemendikbudristek ini dipimpin oleh Sekretaris Jenderal. Sekretariat Jenderal Kemendikbudristek terdiri dari 13 unit kerja dengan rincian 7 Biro, 5 Pusat, dan 1 Lembaga Layanan. Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 7 Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Kemendikbudristek



Sumber: Permendikbudristek Nomor 28 Tahun 2021

Berdasarkan Peraturan Menteri terkait Organisasi dan Tata Kelola Kemendikbudristek tersebut, Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kemendikbudristek. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

1. Koordinasi kegiatan Kemendikbudristek;
2. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kemendikbudristek;
3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi Kemendikbudristek;
4. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
5. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
6. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pengelolaan pengadaan barang/jasa; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Mengingat tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal Kemendikbudristek bertanggung jawab atas seluruh aspek manajemen internal Kemendikbudristek, Sekretariat Jenderal berperan sebagai “penyedia layanan umum” bagi seluruh unit kerja di Kemendikbudristek sekaligus sebagai “simpul penghubung” antar unit utama serta antara Kemendikbudristek dengan lembaga eksternal lainnya.

Kerangka Kelembagaan

A. Gambaran Unit-unit Kerja di bawah Sekretariat Jenderal

1. Biro Perencanaan

Tugas

Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran serta penyiapan bahan pembinaan akuntabilitas kinerja Kementerian.

Fungsi

- Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran Kementerian;
- Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran Kementerian;
- Sinkronisasi program pendidikan dan kebudayaan di pusat dan daerah;
- Sinkronisasi program riset dan teknologi dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi;
- Penyiapan bahan pembinaan akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian;
- Pengelolaan sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian;
- Fasilitasi akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian;
- Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan dan akuntabilitas kinerja Kementerian.

Mitra Kerja

- Internal
 - Seluruh unit kerja Kemendikbudristek (Eselon I, II, Satuan kerja dan Perguruan Tinggi Negeri).
- Eksternal
 - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Kementerian Keuangan;
 - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 - Kementerian Dalam Negeri;
 - Pemerintah Daerah.



2. Biro Keuangan dan Barang Milik Negara

Tugas

Melaksanakan urusan perbendaharaan, pembiayaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan serta pengelolaan barang milik/kekayaan negara Kementerian.

Fungsi

- a. Penyiapan bahan pembinaan perbendaharaan di lingkungan Kementerian;
- b. Penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan anggaran di lingkungan Kementerian;
- c. Pelaksanaan penyelesaian kerugian negara di lingkungan Kementerian;
- d. Penyiapan bahan pembinaan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak dan badan layanan umum di lingkungan Kementerian;
- e. Pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan Kementerian;
- f. Pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan serta barang milik/kekayaan negara di lingkungan Kementerian;
- g. Penyiapan bahan pembinaan pengelolaan barang milik/kekayaan negara Kementerian;
- h. Pelaksanaan inventarisasi barang milik/kekayaan negara Kementerian;
- i. Pelaksanaan pendayagunaan barang milik/kekayaan negara Kementerian;
- j. Pelaksanaan penghapusan barang milik/kekayaan negara Kementerian;
- k. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang keuangan dan barang milik negara Kementerian.

Mitra Kerja

- Internal
Seluruh unit kerja Kemendikbudristek (Eselon I, II, Satuan kerja dan Perguruan Tinggi Negeri).
- Eksternal
 - Kementerian Keuangan;
 - Badan Pemeriksa Keuangan.



3. Biro Sumber Daya Manusia

Tugas

Melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan sumber daya manusia di lingkungan Kementerian.

Fungsi

- a. Penyusunan rencana kebutuhan sumber daya manusia Kementerian;
- b. Pelaksanaan urusan formasi dan distribusi sumber daya manusia di lingkungan Kementerian;
- c. Pelaksanaan penilaian kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Kementerian;
- d. Pelaksanaan urusan pengadaan sumber daya manusia di lingkungan Kementerian;
- e. Penyiapan bahan pembinaan dan disiplin pegawai Kementerian;
- f. Pelaksanaan urusan promosi dan mutasi jabatan pimpinan tinggi, administrasi, dan fungsional di lingkungan Kementerian;
- g. Pelaksanaan urusan pemberhentian dan pemensiunan pegawai di lingkungan Kementerian;
- h. Pelaksanaan urusan pemberian penghargaan pegawai di lingkungan Kementerian;
- i. Pelaksanaan urusan penilaian kinerja sumber daya manusia di lingkungan Kementerian;
- j. Pelaksanaan urusan tata naskah dan layanan informasi kepegawaian di lingkungan Kementerian;
- k. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang sumber daya manusia.

Mitra Kerja

- Internal
 - Seluruh unit kerja Kemendikbudristek Internal;
 - Seluruh Sumber Daya Manusia Kemendikbudristek.
- Eksternal
 - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 - Badan Kepegawaian Negara.



4. Biro Organisasi dan Tata Laksana

Tugas

Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana, analisis jabatan, dan pengembangan jabatan fungsional serta fasilitasi reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian.

Fungsi

- Penyiapan bahan pembinaan organisasi, ketatalaksanaan, dan analisis jabatan di lingkungan Kementerian;
- Penataan unit organisasi di lingkungan Kementerian;
- Fasilitasi organisasi penyelenggara pendidikan dan kebudayaan di pusat dan daerah;
- Penataan ketatalaksanaan, pelayanan publik, dan analisis jabatan di lingkungan Kementerian;
- Pelaksanaan pengembangan jabatan fungsional Kementerian;
- Fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian;
- Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang organisasi dan tata laksana.

Mitra Kerja

- Internal
 - Seluruh unit kerja Kemendikbudristek (Eselon I, II, Satuan kerja dan Perguruan Tinggi Negeri).
- Eksternal
 - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 - Kementerian Dalam Negeri;
 - Pemerintah Daerah.



5. Biro Hukum

Tugas

Melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan advokasi hukum di lingkungan Kementerian.

Fungsi

- a. Koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan produk hukum lainnya;
- b. Sinkronisasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum lainnya;
- c. pelaksanaan kajian peraturan perundang-undangan dan produk hukum lainnya;
- d. Penyusunan peraturan perundang-undangan dan produk hukum lainnya;
- e. Pelaksanaan penelaahan kasus dan masalah hukum di lingkungan Kementerian;
- f. Pelaksanaan advokasi hukum kepada satuan organisasi dan pegawai di lingkungan Kementerian;
- g. Penyiapan koordinasi dan penyusunan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama;
- h. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang hukum.

Mitra Kerja

- Internal
 - Seluruh unit kerja Kemendikbudristek;
 - Seluruh Sumber Daya Manusia Kemendikbudristek.
- Eksternal
 - Kementerian/Lembaga Terkait;
 - Masyarakat;
 - Pemerintah Daerah;
 - Aparat Penegak Hukum.



6. Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat

Tugas

Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan penyelenggaraan kerja sama luar negeri dan fasilitasi kerja sama dalam negeri serta pelaksanaan urusan publikasi dan hubungan masyarakat.

Fungsi

- a. Penyiapan bahan pembinaan kerja sama luar negeri di bidang pendidikan dan kebudayaan serta riset dan teknologi dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi;
- b. Koordinasi dan penyelenggaraan kerja sama luar negeri di bidang pendidikan dan kebudayaan serta riset dan teknologi dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi;
- c. Fasilitasi kerja sama dalam negeri;
- d. Koordinasi urusan atase pendidikan dan kebudayaan, Wakil Republik Indonesia pada *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*, *The Southeast Asian Ministers of Education Organization*, sekolah diplomatik, dan sekolah Indonesia di luar negeri;
- e. Fasilitasi dan administrasi kegiatan *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*;
- f. Penyiapan bahan pembinaan pengelolaan informasi, publikasi, dan hubungan antar lembaga;
- g. Koordinasi dan pengelolaan informasi, publikasi, dan hubungan antar lembaga, dan layanan masyarakat;
- h. Pelaksanaan publikasi di bidang pendidikan dan kebudayaan serta riset dan teknologi dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi;
- i. Pelaksanaan hubungan dan kerja sama antar kementerian, lembaga negara, lembaga pemerintah, lembaga nonpemerintah, masyarakat, dan media;
- j. Pengelolaan perpustakaan Kementerian;
- k. Pemberian layanan informasi di bidang pendidikan dan kebudayaan serta riset dan teknologi dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi;
- l. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kerja sama dan hubungan masyarakat.

Mitra Kerja

- Internal
 - Seluruh unit kerja Kemendikbudristek.
- Eksternal
 - Negara lain;
 - Kedutaan;



- Kementerian Lainnya ;
- Lembaga Regional dan Multilateral;
- Lembaga Negara;
- Lembaga Media;
- Organisasi Internasional;
- Organisasi Masyarakat;
- Masyarakat.



7. Biro Umum Pengadaan Barang dan Jasa

Tugas

Melaksanakan urusan ketatausahaan dan penyiapan bahan pembinaan dan pengelolaan persuratan dan kearsipan di lingkungan Kementerian serta penyiapan bahan pembinaan dan pengadaan barang dan jasa Kementerian.

Fungsi

- a. Pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan;
- b. Pelaksanaan urusan persuratan dan kearsipan di lingkungan Sekretariat Jenderal;
- c. Penyiapan bahan pembinaan dan pengelolaan persuratan dan kearsipan di lingkungan Kementerian;
- d. Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan di lingkungan Kementerian;
- e. Pelaksanaan urusan keprotokolan di lingkungan Kementerian;
- f. Penyiapan bahan pembinaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian;
- g. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian;
- h. Fasilitasi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian;
- i. Penyiapan bahan pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang dan jasa;
- j. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang umum dan pengadaan barang dan jasa.

Mitra Kerja

- Internal
 - Seluruh unit kerja Kemendikbudristek.
- Eksternal
 - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - Kementerian Keuangan;
 - Arsip Nasional Republik Indonesia;
 - Pemerintah Daerah;
 - Satuan Pendidikan.



8. Pusat Data Dan Teknologi Informasi

Tugas

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengelolaan data dan statistik serta pengelolaan dan pendayagunaan teknologi informasi.

Fungsi

- a. Penyiapan kebijakan teknis pengelolaan data dan statistik serta pengelolaan dan pendayagunaan teknologi informasi bidang pendidikan dan kebudayaan serta riset dan teknologi dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi;
- b. Pelaksanaan pengelolaan data dan statistik bidang pendidikan dan kebudayaan serta riset dan teknologi dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi;
- c. Pelaksanaan verifikasi, validasi, integrasi, dan penyebarluasan data dan informasi bidang pendidikan dan kebudayaan serta riset dan teknologi dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi;
- d. Pelaksanaan pengelolaan sistem informasi pendidikan dan kebudayaan serta riset dan teknologi dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi;
- e. Pelaksanaan pengelolaan dan pendayagunaan teknologi informasi bidang pendidikan dan kebudayaan;
- f. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang data dan teknologi informasi.

Mitra Kerja

- Internal
 - Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah;
 - Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi;
 - Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.
- Eksternal
 - Kementerian Keuangan;
 - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Mitra Pembangunan;
 - Lembaga Riset;
 - Peserta Didik;
 - Guru;
 - Masyarakat.



9. Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai

Tugas

Melaksanakan penyiapan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia pendidikan dan kebudayaan.

Fungsi

- Penyiapan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia pendidikan dan kebudayaan;
- Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia pendidikan dan kebudayaan;
- Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia pendidikan dan kebudayaan;
- Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia.

Mitra Kerja

- Internal
 - Seluruh unit kerja Kemendikbudristek.
- Eksternal
 - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
 - Pemerintah Daerah;
 - Mitra Pembangunan Masyarakat;
 - Instansi Pembina Jabatan Fungsional;
 - LAN RI sebagai Pembina Pelatihan ASN;
 - Kementerian dan Lembaga yang membidangi Pengembangan Kompetensi ASN;
 - Stakeholder lainnya (Komunitas/Yayasan/Asosiasi Profesi).

10. Pusat Prestasi Nasional

Tugas

Melaksanakan penyiapan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang pengembangan prestasi dan manajemen talenta.

Fungsi

- a. Penyiapan kebijakan teknis di bidang pengembangan prestasi dan manajemen talenta;
- b. Pelaksanaan pengembangan prestasi satuan pendidikan dan peserta didik;
- c. Pelaksanaan analisis, pengembangan, dan pemanfaatan talenta;
- d. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan prestasi dan manajemen talenta;
- e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang prestasi dan manajemen talenta.

Mitra Kerja

- Internal
 - Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah;
 - Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi;
 - Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.
- Eksternal
 - Peserta Didik;
 - Organisasi Masyarakat;
 - Diaspora.



11. Pusat Penguatan Karakter

Tugas

Melaksanakan penyiapan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang penguatan karakter.

Fungsi

- Penyiapan kebijakan teknis di bidang penguatan karakter;
- Pelaksanaan penguatan karakter;
- Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan penguatan karakter;
- Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penguatan karakter.

Mitra Kerja

- Internal
 - Seluruh unit kerja Kemendikbudristek.
- Eksternal
 - Satuan pendidikan;
 - Masyarakat umum;
 - Kementerian/lembaga terkait penguatan karakter;
 - Pemerintah Daerah;
 - Mitra Pembangunan Masyarakat.

12. Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan

Tugas

Melaksanakan penyiapan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang layanan pembiayaan pendidikan.

Fungsi

- Penyiapan kebijakan teknis di bidang layanan pembiayaan pendidikan;
- Pelaksanaan layanan pembiayaan pendidikan;
- Koordinasi pelaksanaan layanan pembiayaan pendidikan;
- Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan pembiayaan pendidikan.

Mitra Kerja

- Internal
 - Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah;
 - Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi;
 - Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.
- Eksternal



- Peserta Didik;
- Guru dan Tenaga Kependidikan;
- Satuan Pendidikan.

13. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi

Tugas

Melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi (secara administratif).

Fungsi

- a. pelaksanaan pemetaan mutu pendidikan tinggi;
- b. pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi;
- c. pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu pengelolaan perguruan tinggi;
- d. pelaksanaan fasilitasi kesiapan perguruan tinggi dalam penjaminan mutu eksternal;
- e. pelaksanaan fasilitasi penilaian angka kredit pendidik dan tenaga kependidikan perguruan tinggi;
- f. pelaksanaan fasilitasi pendirian perguruan tinggi dan pembentukan program studi;
- g. pelaksanaan kerja sama;
- h. pengelolaan data dan informasi perguruan tinggi;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fasilitasi peningkatan mutu perguruan tinggi; dan
- j. pelaksanaan administrasi.

Mitra Kerja

- Internal
 - Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi;
 - Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi;
 - Perguruan Tinggi Negeri.
- Eksternal
 - Mahasiswa;
 - Perguruan Tinggi Swasta;
 - Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.



Kerangka Pendanaan

Dalam rangka memenuhi target kesuksesan, dibutuhkan sumber pendanaan yang berasal dari APBN dengan rincian sebagai berikut:

A. Kerangka Pendanaan Tahun 2020–2021

Program/Kegiatan	2020	2021
Peningkatan Layanan Prima dalam Pengadaan dan Penataan BMN serta Sarana Prasarana Kementerian	37.732	-
Peningkatan Layanan Prima di bidang Hukum	41.072	40.626
Peningkatan Efektivitas, Pengelolaan dan Pembinaan ASN	52.500	47.425
Peningkatan Layanan Prima di Bidang Pengelolaan Anggaran dan BMN	153.301	155.753
Peningkatan Layanan Prima dalam Perencanaan, Anggaran dan Akuntabilitas Kinerja	160.729	108.541
Peningkatan Layanan Prima dalam menunjang Fungsi Pelayanan Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa	307.132	433.183
Peningkatan Layanan Prima di Bidang Organisasi dan Tata Laksana	19.200	27.626
Peningkatan Layanan Prima di Bidang Kerja Sama dan Kehumasan	326.530	418.175
Penyediaan data dan statistik serta pengembangan dan pendayagunaan teknologi informasi untuk pendidikan dan kebudayaan	340.120	382.504
Pengembangan Pendidikan Sains dan Kerja Sama di Kawasan Asia Tenggara	86.304	86.318
Layanan Pembiayaan Pendidikan	19.828.218	28.098.526
Sekretariat Jenderal		
Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	22.067.563	30.823.529

B. Kerangka Pendanaan Tahun 2022–2024

Program/Kegiatan	2022	2023	2024
Peningkatan Layanan Prima di Bidang Hukum	17.445	19.190	21.109
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan dan Pembinaan Aparatur Sipil Negara	27.775	28.609	29.469
Peningkatan Layanan Prima di Bidang Pengelolaan Anggaran dan Barang Milik Negara	62.223,64	64.090,61	66.014,05
Peningkatan Pelayanan Prima Dalam Perencanaan, Penganggaran dan Akuntabilitas Kinerja	54.912,55	57.145	59.394
Peningkatan Layanan Prima dalam Menunjang Fungsi Pelayanan Umum Kementerian dan Pengadaan Barang dan Jasa	354.427	365.060	378.012
Peningkatan Layanan Prima di Bidang Kerja Sama dan Kehumasan	133.354	272.373	281.944
Penyediaan Data dan Statistik serta Pengembangan dan Pendayagunaan Teknologi Informasi untuk Pendidikan dan Kebudayaan	121.493	169.087	175.211
Pengelolaan Pengembangan Pendidikan, Sains, Budaya, dan Kerja Sama di Kawasan Asia Tenggara	47.756	49.189	50.665
Peningkatan Layanan Prima di Bidang Organisasi dan Tata Laksana	12.875,84	13.519,63	14.195,61
Pengelolaan Pengembangan Prestasi Satuan Pendidikan dan Peserta Didik	11.666,6	12.016	12.378
Pengelolaan Kebijakan Penguatan Karakter	11.707	12.058	12.420
Layanan Pembiayaan Pendidikan	23.822,15	30.046,23	30.947,61
Layanan Pembiayaan Pendidikan Kesejahteraan Guru Non Pegawai Negeri Sipil	8.446.851,76	9.354.851,68	9.366.851,68
Layanan Pembiayaan Pendidikan Dasar Menengah	9.672.433	9.672.433	9.672.433



Program/Kegiatan	2022	2023	2024
Layanan Pembiayaan Pendidikan Tinggi	11.156.316,63	14.949.590,35	19.221.448,02
Peningkatan Layanan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	81.898,78	84.355,74	86.886,41
Kebijakan Penguatan Karakter	44.579	45.916	47.294
Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pembelajaran	258.685,49	266.447	274.440
Pengembangan Pendidikan, Sains, Budaya, dan Kerja Sama di Kawasan Asia Tenggara	10.307	10.616	10.934
Pengembangan Prestasi Satuan Pendidikan dan Peserta Didik	396.263,54	436.069,35	479.676,28



Penutup

Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kemendikbudristek 2020-2024 ini diharapkan dapat menjadi arahan bagi unit kerja Sekretariat Jenderal dalam melaksanakan program dan kegiatan selama periode perencanaan ini.

Kerangka kesuksesan beserta strategi kunci yang tercantum dalam rencana strategis Sekretariat Jenderal ini diharapkan memberikan gambaran skala prioritas dan arah perubahan Sekretariat Jenderal Kemendikbudristek sehingga implementasi program dan anggaran bisa lebih terarah, selaras serta efektif dan efisien.

Rencana strategis ini telah disusun dengan mengacu berbagai prioritas pemerintah, prioritas Menteri, dan arahan Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek. Namun Perencanaan ini tidak bersifat ketat, untuk memberi ruang bagi hal-hal yang bersifat mendesak dan perlu, sesuai dengan arah kebijakan pemerintah. Kondisi Pandemi COVID-19 menjadi pemelajaran tentang pentingnya kebijakan yang bersifat responsif.

Disadari bahwa kesuksesan Sekretariat Jenderal akan membutuhkan dukungan dan kolaborasi berbagai pihak, baik di internal Kemendikbudristek, Kementerian dan Lembaga lain di pusat dan daerah, serta masyarakat. Kerja keras dari seluruh jajaran Sekretariat Jenderal dan sinergi dengan semua pihak yang terkait sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan tujuan, kesuksesan, dan program prioritas Sekretariat Jenderal.



Lampiran

Matriks Kinerja dan Pendanaan Sekretariat Jenderal

Kode		Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Satuan	Baselin e	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Pengampu	Sumber Data
				2020	2022	2023	2024	2022	2023	2024		
		Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Wajib Belajar 12 Tahun										
SP	Meningkatnya partisipasi pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah											
IKP 1.2.2	Rasio Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7-12 untuk penduduk 20% termiskin dan 20% terkaya		Rasio	0,9904	0,9924	0,9934	0,9944	4.221.726,65	4.221.726,65	4.221.726,65	Sekretariat Jenderal	BPS
4465	Layanan Pembiayaan Pendidikan Dasar Menengah											
SK	Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat dasar											
IKK 1.2.2.1	Jumlah siswa SD/SDLB/Sederajat yang memperoleh PIP		Orang	10.360.614	10.360.614	10.360.614	10.360.614	4.221.726,65	4.221.726,65	4.221.726,65	Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan	DTKS, Dapodik, Sipintar
SP	Meningkatnya partisipasi pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah											
IKP 1.3.2	Rasio Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 13-15 untuk penduduk 20% termiskin dan 20% terkaya		Rasio	0,9392	0,9422	0,9437	0,9452	2.727.548,14	2.727.548,14	2.727.548,14	Sekretariat Jenderal	BPS
4465	Layanan Pembiayaan Pendidikan Dasar Menengah											



Kode	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Satuan	Baselin e	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Pengampu	Sumber Data
			2020	2022	2023	2024	2022	2023	2024		
SK	Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat Dasar										
IKK 1.3.2.1	Jumlah siswa SMP/SMPLB/Sederajat yang memperoleh PIP	Orang	4.369.968	4.369.968	4.369.968	4.369.968	2.727.548,14	2.727.548,14	2.727.548,14	Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan	DTKS, Dapodik, Sipintar
SP	Meningkatnya partisipasi pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah										
IKP 1.4.2	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan SMA/SMK/SMLB/Sederajat 20% termiskin dan 20% terkaya	Rasio	0,77	0,79	0,80	0,81	2.920.301,21	2.920.301,21	2.926.215,21	Sekretariat Jenderal	BPS
4465	Layanan Pembiayaan Pendidikan Dasar Menengah										
SK	Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat menengah										
IKK 1.4.2.1	Jumlah siswa SMA/SMK/SMLB/Sederajat yang memperoleh PIP	Orang	3.197.410	3.197.410	3.197.410	3.197.410	2.723.158,21	2.723.158,21	2.723.158,21	Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan	DTKS, Pusdatin, Sipintar
SK	Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan pada sekolah Indonesia Luar Negeri										
IKK 1.4.2.2	Jumlah sekolah Indonesia Luar Negeri yang mendapatkan layanan pembiayaan	Lembaga	13	13	13	13	197.143,00	197.143,00	203.057,00	Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat	Laporan Internal



Kode	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Satuan	Baselin e	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Pengampu	Sumber Data
			2020	2022	2023	2024	2022	2023	2024		
Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran											
SP	Meningkatnya nilai asesmen kompetensi (literasi dan numerasi) satuan pendidikan										
IKP 2.2.5	Jumlah satuan pendidikan yang memanfaatkan model pembelajaran untuk perbaikan kualitas pembelajaran	Satuan Pendidikan	182	186	188	190	10.307,00	10.606,00	10.934,00	Sekretariat Jenderal	Laporan Internal
6395	Pengembangan Pendidikan, Sains, Budaya, dan Kerja Sama di Kawasan Asia Tenggara										
SK	Terselenggaranya pengembangan pendidikan, sains, budaya dan kerja sama di kawasan asia tenggara										
IKK 2.2.5.1	Jumlah satuan pendidikan yang dijadikan model dalam pengembangan Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh (PTJJ), gizi dan pangan di Kawasan Asia Tenggara	Satuan Pendidikan	180	184	186	188	3.995,00	4.115,00	4.238,00	SEAMEO SEAMOLEC SEAMEO RECFON	Laporan Kinerja Seameo Seamolec
SK	Terselenggaranya pengembangan pendidikan, sains, budaya dan kerja sama di kawasan asia tenggara										

Kode	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Satuan	Baselin e	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Pengampu	Sumber Data
			2020	2022	2023	2024	2022	2023	2024		
IKK 2.2.5.2	Jumlah penelitian bidang Biologi Tropika yang dikembangkan bersama satuan pendidikan di kawasan Asia Tenggara	Penelitian	20	20	22	22	1.666,00	1.716,00	1.767,00	SEAMEO BIOTROP	Laporan Kinerja Seameo Seamolec
SK	Terselenggaranya pengembangan pendidikan, sains, budaya dan kerja sama di kawasan Asia Tenggara										
IKK 2.2.5.3	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang dijadikan model dalam mengimplementasikan inovasi/pengembangan pendidikan bidang Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), dan Bahasa di kawasan Asia Tenggara	Orang	1.972	3.510	3.700	3.900	3.549,00	3.655,00	3.765,00	SEAMEO QITEP	Laporan Kinerja Seameo Seamolec
SK	Terselenggaranya pengembangan pendidikan, sains, budaya dan kerja sama di kawasan Asia Tenggara										
IKK 2.2.5.4	Jumlah Lembaga yang dijadikan model pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Keluarga di Kawasan Asia Tenggara	Lembaga	15	15	17	17	1.097,00	1.130,00	1.164,00	SEAMEO CECCEP	Laporan Kinerja Seameo Seamolec
SP	Meningkatnya kualitas dan kemanfaatan hasil asesmen untuk praktik pembelajaran										



Kode	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Satuan	Baselin e	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Pengampu	Sumber Data
			2020	2022	2023	2024	2022	2023	2024		
IKP 2.2.6	Persentase Pendidik dan Peserta Didik yang memanfaatkan <i>Platform Digital</i> Pendidikan	%	-	15,00	20,00	30,00	258.68 5,49	266.44 7,00	274.440 ,00	Sekretariat Jenderal	www.belajar.id
6394	Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pembelajaran										-
SK	Meningkatnya jumlah pendidik dan peserta didik dalam pemanfaatan TIK untuk pembelajaran										
IKK 2.2.6.1	Jumlah Pendidik dan Peserta Didik yang memanfaatkan Platform digital	Orang	-	3.382.6 04	5.073.9 06	6.765.2 08	258.68 5,49	266.44 7,00	274.440 ,00	Pusat Data dan Teknologi Informasi	DIPA akhir 2021 dan awal 2022
SP	Meningkatnya internalisasi nilai penguatan karakter										
IKP 2.3.2	Persentase provinsi dan kabupaten/kota yang mengimplementasikan materi karakter terkait Profil Pelajar Pancasila pada satuan pendidikan	%	-	40	65	100	16.440, 00	16.933, 00	17.441,0 0	Sekretariat Jenderal	Laporan Puspeka, Laporan Provinsi/Kabupaten/ Kota
6393	Kebijakan Penguatan Karakter										
SK	Terlaksananya penguatan karakter bagi ekosistem Pendidikan dan kebudayaan										

Kode	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Satuan	Baselin e	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Pengampu	Sumber Data
			2020	2022	2023	2024	2022	2023	2024		
IKK 2.3.2.1	Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan materi penguatan karakter terkait Profil Pelajar Pancasila pada ekosistem pendidikan	Provinsi/ Kab/ Kota	-	219	356	548	16.440,00	16.933,00	17.441,00	Pusat Penguatan Karakter	Laporan Puspeka, Laporan Provinsi/Kabupaten/Kota
IKP 2.3.3	Persentase provinsi dan kabupaten/kota yang mengimplementasikan materi untuk menuntaskan perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi pada satuan Pendidikan	%	-	35	65	100	19.978,00	20.577,00	21.195,00	Sekretariat Jenderal	Laporan Puspeka, Laporan Provinsi/Kabupaten/Kota
6393	Kebijakan Penguatan Karakter										
SK	Terlaksananya penguatan karakter bagi ekosistem Pendidikan dan kebudayaan										
IKK 2.3.3.1	Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan materi penguatan karakter untuk menuntaskan perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi pada ekosistem pendidikan	Provinsi/ Kab/ Kota	-	191	356	548	19.978,00	20.577,00	21.195,00	Pusat Penguatan Karakter	Laporan Puspeka, Laporan Provinsi/Kabupaten/Kota



Kode	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Satuan	Baselin e	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Pengampu	Sumber Data
			2020	2022	2023	2024	2022	2023	2024		
IKP 2.3.4	Persentase provinsi dan kabupaten/kota yang telah mengimplementasikan materi terkait toleransi beragama, kesetaraan gender, komitmen kebangsaan, layanan siswa kebutuhan khusus, pembelajaran yang demokratis pada satuan pendidikan	%	-	30	60	100	8.161,00	8.406,00	8.658,00	Sekretariat Jenderal	Laporan Puspeka, Laporan Provinsi/Kabupaten/Kota
6393	Kebijakan Penguatan Karakter										
SK	Terlaksananya penguatan karakter bagi ekosistem Pendidikan dan kebudayaan										
IKK 2.3.4.1	Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan materi penguatan karakter terkait toleransi beragama, kesetaraan gender, komitmen kebangsaan, layanan siswa kebutuhan khusus, pembelajaran yang demokratis pada ekosistem pendidikan	Provinsi/ Kab/ Kota	-	164	328	548	8.161,00	8.406,00	8.658,00	Pusat Penguatan Karakter	Laporan Puspeka, Laporan Provinsi/Kabupaten/Kota
SP	Meningkatnya ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan profesional										

Kode	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Satuan	Baselin e	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Pengampu	Sumber Data
			2020	2022	2023	2024	2022	2023	2024		
IKP 2.4.4	Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan Non PNS yang mendapatkan tunjangan atau bantuan tepat waktu	%	99,43	99,75	99,81	99,87	8.446.851,76	9.354.851,68	9.366.851,68	Sekretariat Jenderal	Sistem Aplikasi Tunjangan
4464	Layanan Pembiayaan Pendidikan Kesejahteraan Guru Non Pegawai Negeri Sipil										
SK	Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan bagi pendidik dan tenaga kependidikan profesional										
IKK 2.4.4.1	Jumlah guru dan tenaga kependidikan Non PNS yang memperoleh tunjangan/bantuan	Orang	311.577	355.500	346.262	341.599	8.446.851,76	9.354.851,68	9.366.851,68	Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan	Sistem Aplikasi Tunjangan, Dapodik
SP	Meningkatnya prestasi peserta didik yang meraih prestasi di tingkat internasional										
IKP 2.5.1	Persentase peserta didik berprestasi pada kompetisi Internasional	%	76,47	77,05	77,29	77,50	516.277,00	487.820,00	536.602,00	Sekretariat Jenderal	Database Manajemen Talenta
6396	Pengembangan Prestasi Satuan Pendidikan dan Peserta Didik										
SK	Meningkatnya peserta didik yang meraih prestasi pada kompetisi di tingkat Internasional										



Kode	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Satuan	Baselin e	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Pengampu	Sumber Data
			2020	2022	2023	2024	2022	2023	2024		
IKK 2.5.1.1	Jumlah peserta didik berprestasi yang terdokumentasi pada sistem manajemen talenta	Orang	5.000	15.000	20.000	25.000	396.143,40	435.757,74	479.333,52	Pusat Prestasi Nasional	Database Manajemen Talenta
Program Pendidikan Tinggi											
SP	Meningkatnya partisipasi pendidikan tinggi										
IKP 1.5.2	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan tinggi 20% termiskin dan 20% terkaya	Rasio	0,28	0,292	0,297	0,302	11.156.316,63	14.949.590,35	19.221.448,02	Sekretariat Jenderal	Susenas, BPS
4469	Layanan Pembiayaan Pendidikan Tinggi										
SK	Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat pendidikan tinggi										
IKK 1.5.2.1	Jumlah mahasiswa yang memperoleh beasiswa KIP-Kuliah/Afirmasi/Prestasi	Orang	773.064	775.620	816.271	927.627	11.156.316,63	14.949.590,35	19.221.448,02	Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan	DTKS, Sistem Aplikasi KIP Kuliah
Program Dukungan Manajemen											
SP	Terwujudnya tata kelola Kemendikbudristek yang berkualitas										
IKP 5.1.1	Indeks akuntabilitas tata kelola keuangan dan BMN	Indeks	Baik	Baik	Baik	Baik	42.330,00	43.600,00	44.909,00	Sekretariat Jenderal	Capaian kinerja Biro keuangan & BMN

Kode	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Satuan	Baselin e	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Pengampu	Sumber Data
			2020	2022	2023	2024	2022	2023	2024		
1983	Peningkatan Layanan Prima di Bidang Pengelolaan Anggaran dan Barang Milik Negara										
SK	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan Barang Milik Negara										
IKK 5.1.1.1	Persentase Satker tertib pengelolaan anggaran	%	72,69	85	90	93	29.516,00	30.401,00	31.314,00	Biro Keuangan dan Barang Milik Negara	Laporan Monev Tindak Lanjut LHP, mol.kemdikbud.go.id , Laporan hasil penilaian kinerja satker BLU
IKK 5.1.1.2	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan perundang-undangan	Laporan	22	22	22	22	4.233,00	4.360,00	4.491,00	Biro Keuangan dan Barang Milik Negara	Laporan Keuangan Biro Keuangan dan BMN,
IKK 5.1.1.3	Persentase satker tertib pengelolaan BMN	%	72	85	90	95	8.581,00	8.839,00	9.104,00	Biro Keuangan dan Barang Milik Negara	simas.kemdikbud.go.id , SIMAN, kertas kerja penilaian BMN
IKP 5.2.1	Indeks Kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan unit layanan terpadu	Indeks	84,60	85	85	85	62.910,00	64.797,00	66.741,00	Sekretariat Jenderal	Laporan Survei Kepuasan Stakeholder
1987	Peningkatan Layanan Prima di Bidang Kerja Sama dan Humas										
SK	Meningkatnya layanan informasi, publikasi, media, dan hubungan antarlembaga										



Kode	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Satuan	Baselin e	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Pengampu	Sumber Data
			2020	2022	2023	2024	2022	2023	2024		
IKK 5.2.1.1	Persentase kualitas publikasi dan informasi bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi	%	92,40	84	86	88	60.250,00	120.000,00	125.000,00	Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat	Laporan Data Analisis Media Sosial, Hasil SSS
SK	Meningkatnya layanan informasi, publikasi, media, dan hubungan antarlembaga										
IKK 5.2.1.2	Persentase kualitas pelayanan publik bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi	%	85	82	84	86	2.660,00	2.740,00	2.822,00	Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat	Isian Instrumen Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
IKP 5.2.2	Persentase kerja sama luar negeri yang ditindaklanjuti oleh stakeholders terkait	%	0	77	79	81	32.720,00	110.778,00	114.101,00	Sekretariat Jenderal	Laporan Internal
SK	Tersedianya layanan prima dalam kerja sama										
IKK 5.2.2.1	Persentase tindak lanjut kerjasama bilateral, regional dan multilateral	%	70	77	79	81	32.720,00	110.778,00	114.101,00	Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat	Laporan Mou & Kerja sama
SP	Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi										
IKP 5.3.1	Persentase pendayagunaan dan pelayanan data pokok Pendidikan dan Kebudayaan	%	40,33	70,16	85,10	100	9.781,00	16.104,00	16.587,00	Sekretariat Jenderal	Dapodik, Dapobud Dapobas, Operasional <i>Data store</i> Pusdatin

Kode	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Satuan	Baselin e	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Pengampu	Sumber Data
			2020	2022	2023	2024	2022	2023	2024		
1991	Penyediaan Data dan Statistik serta Pengembangan dan Pendayagunaan Teknologi Informasi untuk Pendidikan dan Kebudayaan										
SK	Meningkatnya integritas data dan pendayagunaan data pokok pendidikan dan kebudayaan										
IKK 5.3.1.1	Persentase integritas data prioritas (standar, metadata, referensi)	%	40,33	70,16	85,10	100	9.781,00	16.104,00	16.587,00	Pusat Data dan Teknologi Informasi	Dapodik, Dapobud Dapobas, Operasional <i>Data store</i> Pusdatin
IKP 5.3.2	Tingkat Kematangan UKPBJ Kemendikbudristek	Level	Level 3	Level 4	Level 5	Level 5	7.722,00	7.954,00	8.192,00	Sekretariat Jenderal	Laporan Internal
1985	Peningkatan Layanan Prima dalam Menunjang Fungsi Pelayanan Umum Kementerian dan Pengadaan Barang dan Jasa										
SK	Meningkatnya kualitas layanan ketatausahaan serta pengadaan barang dan jasa bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi										
IKK 5.3.2.1	Persentase optimalisasi fungsi UKPBJ Kemendikbudristek	%	38	75	88	100	7.722,00	7.954,00	8.192,00	Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan Hasil Evaluasi



Kode	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Satuan	Baselin e	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Pengampu	Sumber Data
			2020	2022	2023	2024	2022	2023	2024		
IKP 5.3.3	Persentase unit kerja yang mengimplementasikan digitalisasi dokumen	%	25	60	80	100	3.346,00	3.446,00	3.550,00	Sekretariat Jenderal	Laporan Internal
1985	Peningkatan Layanan Prima dalam Menunjang Fungsi Pelayanan Umum Kementerian dan Pengadaan Barang dan Jasa										
SK	Meningkatnya kualitas layanan ketatausahaan serta pengadaan barang dan jasa bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi										
IKK 5.3.3.1	Jumlah unit kerja yang mengimplementasikan sistem naskah dinas elektronik	Unit Kerja	86	206	274	343	3.346,00	3.446,00	3.550,00	Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan Hasil Evaluasi
IKP 5.3.4	Predikat SAKIP Sekretariat Jenderal	Predikat	A	A	A	A	95.430,83	107.910,78	114.543,81	Sekretariat Jenderal	Laporan hasil evaluasi SAKIP
1984	Peningkatan Pelayanan Prima Dalam Perencanaan, Penganggaran dan Akuntabilitas Kinerja										
SK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja										
IKK 5.3.4.1	Persentase Satker yang predikat SAKIP-nya minimal A	%	36	55	65	80	5.081,96	5.285,00	5.497,00	Biro Perencanaan	Laporan hasil evaluasi SAKIP
SK	Meningkatnya tata kelola Biro Perencanaan										

Kode	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Satuan	Baselin e	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Pengampu	Sumber Data
			2020	2022	2023	2024	2022	2023	2024		
IKK 5.3.4.2	Predikat SAKIP Biro Perencanaan minimal A	Predikat	A	A	A	A	16.112,74	16.757,00	17.428,00	Biro Perencanaan	Laporan hasil evaluasi SAKIP
1981	Peningkatan Layanan Prima di Bidang Hukum										
SK	Meningkatnya tata kelola Biro Hukum										
IKK 5.3.4.3	Predikat SAKIP Biro Hukum minimal A	Predikat	BB	A	A	A	1.440,00	1.584,00	1.742,00	Biro Hukum	Laporan hasil evaluasi SAKIP
1983	Peningkatan Layanan Prima di Bidang Pengelolaan Anggaran dan Barang Milik Negara										
SK	Meningkatnya tata kelola Biro Keuangan dan BMN										
IKK 5.3.4.4	Predikat SAKIP Biro Keuangan dan BMN minimal A	Predikat	A	A	A	A	2.014,00	2.074,00	2.136,00	Biro Keuangan dan Barang Milik Negara	Laporan hasil evaluasi SAKIP
4265	Peningkatan Layanan Prima di Bidang Organisasi dan Tata Laksana										
SK	Meningkatnya tata kelola Organisasi dan Tata Laksana										
IKK 5.3.4.5	Predikat SAKIP Biro Organisasi dan Tata Laksana minimal BB	Predikat	BB	A	A	A	504,45	529,67	556,15	Biro Organisasi dan Tata Laksana	Laporan hasil evaluasi SAKIP
1982	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan dan Pembinaan Aparatur Sipil Negara										



Kode	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Satuan	Baselin e	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Pengampu	Sumber Data
			2020	2022	2023	2024	2022	2023	2024		
SK	Meningkatnya tata kelola Biro Sumber Daya Manusia										
IKK 5.3.4.6	Predikat SAKIP Biro Sumber Daya Manusia minimal A	Predikat	BB	A	A	A	972,00	1.002,00	1.032,00	Biro Sumber Daya Manusia	Laporan hasil evaluasi SAKIP
1985	Peningkatan Layanan Prima dalam Menunjang Fungsi Pelayanan Umum Kementerian dan Pengadaan Barang dan Jasa										
SK	Meningkatnya tata kelola Biro Umum dan PBJ										
IKK 5.3.4.7	Predikat SAKIP Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa minimal BB	Predikat	BB	A	A	A	12.660,00	13.040,00	15.431,00	Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan hasil evaluasi SAKIP
1987	Peningkatan Layanan Prima di Bidang Kerja Sama dan Kehumasan										
SK	Meningkatnya tata kelola Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat										
IKK 5.3.4.8	Predikat SAKIP Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat minimal BB	Predikat	BB	A	A	A	37.256,00	38.373,00	39.524,00	Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat	Laporan hasil evaluasi SAKIP
4079	Pengelolaan Pengembangan Pendidikan, Sains, Budaya, dan Kerja Sama di Kawasan Asia Tenggara										

Kode	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Satuan	Baselin e	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Pengampu	Sumber Data
			2020	2022	2023	2024	2022	2023	2024		
SK	Meningkatnya tata kelola SEAMEO SEAMOLEC										
IKK 5.3.4.9	Predikat SAKIP SEAMEO SEAMOLEC minimal BB	Predikat	A	A	A	A	2.556,00	2.633,00	2.712,00	SEAMEO SEAMOLEC	Laporan hasil evaluasi SAKIP
1991	Penyediaan Data dan Statistik serta Pengembangan dan Pendayagunaan Teknologi Informasi untuk Pendidikan dan Kebudayaan										
SK	Meningkatnya tata kelola Pusat Data dan Teknologi Informasi										
IKK 5.3.4.10	Predikat SAKIP Pusat Data dan Teknologi Informasi minimal BB	Predikat	BB	A	A	A	7.987,00	15.025,00	16.528,00	Pusat Data dan Teknologi Informasi	Laporan hasil evaluasi SAKIP
5624	Peningkatan Layanan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai										
SK	Meningkatnya tata kelola Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai										
IKK 5.3.4.11	Predikat SAKIP Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai minimal A	Predikat	A	A	A	AA	158,69	163,45	168,35	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Laporan hasil evaluasi SAKIP
4268	Pengelolaan Kebijakan Penguatan Karakter										
SK	Meningkatnya tata kelola Pusat Penguatan Karakter										
IKK 5.3.4.12	Predikat SAKIP Pusat Penguatan Karakter minimal BB	Predikat	-	BB	A	A	1.080,00	1.112,00	1.146,00	Pusat Penguatan Karakter	Laporan hasil evaluasi SAKIP



Kode	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Satuan	Baselin e	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Pengampu	Sumber Data
			2020	2022	2023	2024	2022	2023	2024		
4267	Pengelolaan Pengembangan Prestasi Satuan Pendidikan dan Peserta Didik										
SK	Meningkatnya tata kelola Pusat Prestasi Nasional										
IKK 5.3.4.13	Predikat SAKIP Pusat Prestasi Nasional minimal BB	Predikat	BB	BB	A	A	108,00	111,00	115,00	Pusat Prestasi Nasional	Laporan hasil evaluasi SAKIP
4269	Layanan Pembiayaan Pendidikan										
SK	Meningkatnya tata kelola Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan										
IKK 5.3.4.14	Predikat SAKIP Pusat layanan Pembiayaan Pendidikan minimal BB	Predikat	-	A	A	A	7.500,00	10.221,66	10.528,30	Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan	Laporan hasil evaluasi SAKIP
IKP 5.3.13	Capaian Nilai Kinerja Anggaran Kemendikbudristek	Kategori	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	568.911,36	585.710,19	604.138,38	Sekretariat Jenderal	Smart DJA
1984	Peningkatan Pelayanan Prima dalam Perencanaan, Penganggaran dan Akuntabilitas Kinerja										
SK	Meningkatnya efektifitas pemantauan dan evaluasi program dan anggaran										
IKK 5.3.13.1	Nilai evaluasi kinerja anggaran Kemendikbudristek	Nilai	90	92	93	94	6.018,04	6.259,00	6.509,00	Biro Perencanaan	SMART DJA
SK	Meningkatnya efektifitas perencanaan dan penganggaran Pusat Kemendikbudristek										

Kode	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Satuan	Baselin e	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Pengampu	Sumber Data
			2020	2022	2023	2024	2022	2023	2024		
IKK 5.3.13.2	Persentase unit kerja dengan indeks perencanaan penganggaran tahunan minimal baik	%	70	85	90	95	16.876,86	17.552,00	18.254,00	Biro Perencanaan	Aplikasi e-planning Kemendikbud, KRISNA Renja, dan SAKTI
SK	Meningkatnya Tata Kelola Biro Perencanaan										
IKK 5.3.13.3	Nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Biro Perencanaan minimal 91	Nilai	97,68	92	93	94	4.719,05	4.908,00	5.104,00	Biro Perencanaan	SMART DJA
1981	Peningkatan Layanan Prima di Bidang Hukum										
SK	Meningkatnya tata kelola Biro Hukum										
IKK 5.3.13.4	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro Hukum minimal 91	Nilai	91,00	93,00	94,00	95,00	5.924,00	6.517,00	7.169,00	Biro Hukum	SMART DJA
1983	Peningkatan Layanan Prima di Bidang Pengelolaan Anggaran dan Barang Milik Negara										
SK	Meningkatnya tata kelola Biro Keuangan dan BMN										
IKK 5.3.13.5	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro Keuangan dan BMN minimal 91	Nilai	99,69	93	94	95	12.914,00	13.302,00	13.701,00	Biro Keuangan dan Barang Milik Negara	SMART DJA
4265	Peningkatan Layanan Prima di Bidang Organisasi dan Tata Laksana										



Kode	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Satuan	Baselin e	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Pengampu	Sumber Data
			2020	2022	2023	2024	2022	2023	2024		
SK	Meningkatnya tata kelola Biro Organisasi dan Tata Laksana										
IKK 5.3.13.6	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro Organisasi dan Tata Laksana minimal 91	Nilai	91	92	92	93	5.294,50	5.559,23	5.837,19	Biro Organisasi dan Tata Laksana	SMART DJA
1982	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan dan Pembinaan Aparatur Sipil Negara										
SK	Meningkatnya tata kelola Biro Sumber Daya Manusia										
IKK 5.3.13.7	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro Sumber Daya Manusia minimal 93,75	Nilai	93,75	94	94,50	95	11.621,00	11.970,00	12.330,00	Biro Sumber Daya Manusia	SMART DJA
1985	Peningkatan Layanan Prima dalam Menunjang Fungsi Pelayanan Umum Kementerian dan Pengadaan Barang dan Jasa										
SK	Meningkatnya tata kelola Biro Umum dan PBJ										
IKK 5.3.13.8	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa minimal 90	Nilai	91	93	94	95	330.699,00	340.620,00	350.839,00	Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa	SMART DJA

Kode	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Satuan	Baselin e	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Pengampu	Sumber Data
			2020	2022	2023	2024	2022	2023	2024		
1987	Peningkatan Layanan Prima di Bidang Kerja Sama dan Kehumasan										
SK	Meningkatnya tata kelola Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat										
IKK 5.3.13.9	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat minimal 88	Nilai	98,54	90	92	94	468,00	482,00	497,00	Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat	SMART DJA
4079	Pengelolaan Pengembangan Pendidikan, Sains, Budaya, dan Kerja Sama di Kawasan Asia Tenggara										
SK	Meningkatnya tata kelola SEAMEO SEAMOLEC										
IKK 5.3.13.10	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L SEAMEO SEAMOLEC minimal 88	Nilai	94,92	90	92	94	45.200,00	46.556,00	47.953,00	SEAMEO SEAMOLEC	SMART DJA
1991	Penyediaan Data dan Statistik serta pengembangan dan pendayagunaan Teknologi Informasi untuk Pendidikan dan Kebudayaan										
SK	Meningkatnya tata kelola Pusat Data dan Teknologi Informasi										



Kode	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Satuan	Baselin e	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Pengampu	Sumber Data
			2020	2022	2023	2024	2022	2023	2024		
IKK 5.3.13.11	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Data dan Teknologi Informasi minimal 89	Nilai	89	90	90	92	67.061,00	64.993,00	66.943,00	Pusat Data dan Teknologi Informasi	SMART DJA
5624	Peningkatan Layanan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai										
SK	Meningkatnya tata kelola Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai										
IKK 5.3.13.12	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai minimal 91,82	Nilai	91,72	91,90	91,98	92,06	23.608,15	24.316,40	25.045,89	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	SMART DJA
4268	Pengelolaan Kebijakan Penguatan Karakter										
SK	Meningkatnya tata kelola Pusat Penguatan Karakter										
IKK 5.3.13.13	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Penguatan Karakter minimal 85	Nilai	85,00	90,45	90,80	91,15	10.627,00	10.946,00	11.274,00	Pusat Penguatan Karakter	SMART DJA
4267	Pengelolaan Pengembangan Prestasi Satuan Pendidikan dan Peserta Didik										
SK	Meningkatnya tata kelola Pusat Prestasi Nasional										

Kode	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Satuan	Baselin e	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Pengampu	Sumber Data
			2020	2022	2023	2024	2022	2023	2024		
IKK 5.3.13.14	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Prestasi Nasional minimal 86	Nilai	86,00	88,50	90,00	91,00	11.558,60	11.905,00	12.263,00	Pusat Prestasi Nasional	SMART DJA
4269	Layanan Pembiayaan Pendidikan										
SK	Meningkatnya tata kelola Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan										
IKK 5.3.13.15	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal 85	Nilai	85,00	86,00	88,00	90,00	16.322,15	19.824,57	20.419,30	Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan	SMART DJA
IKP 5.3.17	Persentase daerah dengan nilai perencanaan dan pengelolaan dana alokasi khusus bidang pendidikan minimal baik	%	74	77,5	79	80	6.103,91	6.384,00	6.602,00	Sekretariat Jenderal	OMSPAN, SIM DAK, SPASIKITA
1984	Peningkatan Pelayanan Prima dalam Perencanaan, Penganggaran dan Akuntabilitas Kinerja										
SK	Meningkatkan efektifitas pemantauan DAK Fisik dan Non Fisik										
IKK 5.3.17.1	Persentase kesesuaian kebijakan anggaran dana alokasi khusus pendidikan terhadap pelaksanaan anggaran	%	85,90	88	89	90	6.103,91	6.384,00	6.602,00	Biro Perencanaan	OMSPAN, SIMDAK, SPASIKITA
SP	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudristek						30.263,00	32.078,78	34.003,51		



Kode	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Satuan	Baselin e	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Pengampu	Sumber Data
			2020	2022	2023	2024	2022	2023	2024		
IKP 5.4.1	Nilai PMPRB Kemendikbudristek	Nilai	87	89	90	91	1.555,80	1.633,59	1.715,28	Sekretariat Jenderal	Surat Menteri PAN RB tentang Hasil PMPRB
1982	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan dan Pembinaan Aparatur Sipil Negara										
SK	Meningkatnya Indeks penerapan sistem merit ASN Kemendikbudristek										
IKK 5.4.1.1	Persentase pegawai yang memperoleh nilai kinerja minimal 110	%	-	35	40	45	7.542,00	7.768,00	8.002,00	Biro Sumber Daya Manusia	Nilai PPKP dari aplikasi e-SKP
IKK 5.4.1.2	Persentase pegawai dengan perolehan pengembangan kompetensi minimal 20 JP	%	-	60	75	90	3.227,00	3.323,00	3.423,00	Biro Sumber Daya Manusia	Data aplikasi HCDP, data pelaksanaan pengembangan pegawai
IKK 5.4.1.3	Persentase pegawai yang menjalani mutasi jabatan dan/atau mutasi wilayah sesuai pola karir Kemendikbudristek dan kebutuhan organisasi	%	-	55	70	85	4.413,00	4.546,00	4.682,00	Biro Sumber Daya Manusia	Laporan Internal
4265	Peningkatan Layanan Prima di Bidang Organisasi dan Tata Laksana										
SK	Meningkatnya indeks efektifitas organisasi di lingkungan Kemendikbudristek										



Kode	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Satuan	Baselin e	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Pengampu	Sumber Data
			2020	2022	2023	2024	2022	2023	2024		
IKK 5.4.1.4	Persentase unit kerja di lingkungan Kemendikbudristek yang hasil evaluasi organisasinya efektif	%	90	95	95	100	7.076,89	7.430,73	7.802,27	Biro Organisasi dan Tata Laksana	Laporan Internal
1981	Peningkatan Layanan Prima di Bidang Hukum										
SK	Terwujudnya harmonisasi peraturan perundang-undangan dan fasilitasi advokasi hukum bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi										
IKK 5.4.1.5	Persentase peraturan perundang-undangan bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang telah diharmonisasi	%	100	100	100	100	6.501,00	7.151,00	7.866,00	Biro Hukum	Data usulan rancangan peraturan perundang-undangan
IKK 5.4.1.6	Persentase masalah hukum dan perkara yang ditangani di lingkungan Kemendikbudristek	%	100	100	100	100	3.580,00	3.938,00	4.332,00	Biro Hukum	Data laporan dan inventarisasi masalah hukum dan perkara
5624	Peningkatan Layanan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai										
SK	Meningkatnya kemampuan ASN Kemendikbudristek melalui pelatihan dasar, manajerial, teknis, fungsional, dan sosial-kultural ASN Kemendikbudristek										



Kode	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Satuan	Baselin e	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Pengampu	Sumber Data
			2020	2022	2023	2024	2022	2023	2024		
IKK 5.4.1.7	Rerata nilai dampak pasca pelatihan minimal 89,79	Nilai	89,72	89,86	89,93	90	54.358,65	55.989,41	57.669,09	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Laporan Monev Pasca Pelatihan Dasar, Kepemimpinan, Teknis, dan Fungsional
SK	Tersedianya layanan pelatihan ASN yang berkualitas										
IKK 5.4.1.8	Persentase Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Pelatihan Minimal 88,31	%	88,21	88,41	88,51	88,61	3.773,29	3.886,48	4.003,08	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Laporan Monev Pasca Pelatihan Dasar, Kepemimpinan, Teknis, dan Fungsional
1991	Penyediaan Data dan Statistik serta pengembangan dan pendayagunaan Teknologi Informasi untuk Pendidikan dan Kebudayaan										
SK	Meningkatnya pemanfaatan TIK dalam layanan pendidikan dan kebudayaan										
IKK 5.4.1.9	Jumlah kumulatif SDM yang mendapatkan layanan pembinaan jabatan fungsional pengembangan teknologi pembelajaran	Orang	663	750	1.250	1.500	3.210,00	6.378,00	6.569,00	Pusat Data dan Teknologi Informasi	https://jabfung.kemdi.kbud.go.id
SK	Meningkatnya dukungan pemanfaatan TIK										

Kode	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Satuan	Baselin e	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Pengampu	Sumber Data
			2020	2022	2023	2024	2022	2023	2024		
IKK 5.4.1.10	Peningkatan Nilai indeks SPBE Kemendikbudristek	Indeks	3,40	3,50	3,60	3,70	33.454, 00	66.587, 00	68.584, 00	Pusat Data dan Teknologi Informasi	Hasil penilaian SPBE oleh Menpan RB





**SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

REPUBLIK INDONESIA
www.kemdikbud.go.id